SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang nyata, bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam rangka menanggulangi kemiskinan, kesenjangan dan percepatan pembangunan di tingkat Pekon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;

15. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
16. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon dan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
18. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan. Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
20. Bendahara Pekon adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Peratin dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dan uang untuk keperluan belanja Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon;
21. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yang selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Bobot Pekon (BPx) adalah nilai Pekon yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independent;
23. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Bobot Pekon (BPx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Pekon dengan Pekon Lainnya;
24. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Pekon yang meliputi Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Keterjangkauan;
25. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah meliputi : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk seluruh Pekon, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat;
26. Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) untuk masing-masing Pekon adalah sebesar 60 % (enam puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) seluruh Pekon dibagi jumlah Pekon definitif se-Kabupaten Lampung Barat;
27. Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah sebesar 40 % (empat puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) se-Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
SUMBER DAN TUJUAN ADP

Pasal 2

(1) ADP bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

(2) ADP Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 16.901.627.300,- (enam belas milyar sembilan ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 3

Tujuan ADP adalah:

a. menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
c. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Pekon;
d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
e. meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon;
f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
h. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III
PRINSIP KEBIJAKAN ADP

Pasal 4

Prinsip kebijakan ADP adalah :

a. pengelolaan ADP dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
b. pengelolaan keuangan ADP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Pekon dalam APB Pekon;
c. demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama;
d. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
e. pemberdayaan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dengan mengedepankan unsur partisipasi masyarakat; dan
f. prinsip pemerataan, 60% (enam puluh prosen) dari total ADP yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dibagikan kepada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Pekon definitif;

g. adil, 40% (empat puluh prosen) dari total ADP dengan besarannya berdasarkan perhitungan nilai bobot Pekon (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu seperti Rumah Tangga Miskin (RTM), Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP);
h. seluruh kegiatan dalam pelaksanaan ADP harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB IV
PERHITUNGAN ADP

Pasal 5

(1) Plafon ADP untuk seluruh Pekon Se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) ADP untuk masing-masing Pekon ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) berdasarkan porsi Pekon yang bersangkutan;

(3) Bobot Pekon ditentukan berdasarkan :
a. jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun sebelumnya;
b. keterjangkauan Pekon;
c. jumlah target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
d. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
e. luas wilayah Pekon;
f. dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.

Pasal 6

Perhitungan ADP untuk masing-masing Pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Pekon dengan rumus sebagai berikut :

a. 60% Dana Pemerataan, dimana setiap Pekon memperoleh dana yang sama;

b. 40% Dana Proporsional;

c. Rumus Dana Proporsional sebagimana dimaksud pada huruf b adalah :

$ADPx = ADPM + ADPPx$

$ADPPx = BPx * (ADPx - \Sigma ADPM)$

$BPx = a1\ KV1x + a2\ KV2x + a3\ KV3 + \ldots + an\ KV\ n$

$KV1,2,\ldots x = \frac{V1,2,\ldots x}{\Sigma\ Vn}$

Keterangan :

ADP	: Alokasi Dana Pekon
ADPM	: Alokasi Dana Pekon Minimal / Merata (60%)
ADPP	: Alokasi Dana Pekon Proporsional (40%)
BP	: Bobot Pekon
KV	: Koefisien Variabel (Kemiskinan, Keterjangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Target (PBB)

a	: Angka bobot masing-masing Variabel	
	- Rumah Tangga Miskin	**(0,3000)**
	- Keterjangkauan	**(0,2900)**
	- Luas Wilayah	**(0,1600)**
	- Jumlah Penduduk	**(0,1400)**
	- Target PBB	**(0,1100)**
ΣVn	: Jumlah angka variabel	

BAB V
PETUNJUK PELAKSANA, PETUNJUK TEKNIS DAN BESARAN ADP

Pasal 7

Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dan Besaran ADP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap ADP dilakukan melalui :
a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Peratin;
b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi pengawasan; dan
c. Pengawasan masyarakat.

(2) Pengawasan melekat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan Bendahara Pekon oleh Peratin dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

(3) Pengawasan fungsional dilakukan terhadap pengelolaan ADP oleh aparat fungsional; dan

(4) Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan ADP oleh Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

(1) Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan ADP.

(2) Kriteria untuk penetapan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi ADP Tingkat Kabupaten berupa pidana, denda atau mengganti kerugian; dan

(3) Apabila pengelolaan ADP yang diberikan kepada Pekon tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 maret 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

I. MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon sebagai berikut :
   a. Peratin sebagai Kepala Pemerintahan Pekon adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bertanggungjawab secara administrasi dan hukum;
   b. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
   c. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah Perangkat Pekon yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Peratin, terdiri dari :
      1). Juru Tulis bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Pekon, menyusun Rancangan Peraturan Pekon (RPP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun Rancangan Keputusan Peratin mengenai pelaksanaan Peraturan Pekon tentang APBP/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan bertanggungjawab kepada Peratin;
      2). Perangkat Pekon lainnya.
   d. Peratin menetapkan Bendahara Pekon dengan Keputusan Peratin.
2. Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon (ADP) terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
3. Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Pekon;
4. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah :
   a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon (ADP) yang sama untuk setiap Pekon, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM);
   b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon berdasarkan Nilai Bobot Pekon (BPx) yang dihitung dengan rumus dan variabel Keterjangkauan, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga Miskin, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).

c. Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, adalah besarnya ADPM adalah 60% (enam puluh prosen) dari jumlah ADP dan besarnya ADPP adalah 40% (empat puluh prosen) dari jumlah ADP.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
2. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah 30% (tiga puluh prosen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Pekon dan 70% (tujuh puluh prosen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) digunakan untuk :
   a. biaya Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
   b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
   c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
   d. perbaikan lingkungan dan permukiman;
   e. teknologi Tepat Guna (TTG);
   f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
   g. pengembangan sosial budaya; dan
   h. peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

III. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk;
2. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 50% (lima puluh prosen) tahap pertama dan 50% (lima puluh prosen) tahap kedua.
3. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) :
   a. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) / Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
   b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Barat;

c. Alokasi Dana Pekon (ADP) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Bank Lampung Cabang Liwa selaku Pemegang Rekening Giro Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat ke Rekening Pekon di Bank Pemerintah yang ditunjuk.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon (ADP) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
3. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj.) pengeluaran Alokasi Dana Pekon (ADP) harus dilampiri dengan :
   a. Buku Kas Umum;
   b. Buku Kas Pembantu rincian Obyek Penerimaan /Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
   c. Bukti Atas Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara.

B. PELAPORAN

1. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah sebagai berikut :
   a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja ADP;
   b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADP.
2. Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui oleh Peratin kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
3. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
4. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

V. TIM FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

A. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten :

1. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
   a. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten;
   b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   c. Kabid. Pemerintahan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   d. Kasubbid. Kelembagaan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   e. 10 (sepuluh) orang dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait sebagai anggota.

2. Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
   a. menyusun pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
   b. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP);
   c. merumuskan besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) mulai dari perhitungan Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM), Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
   d. menyusun formulasi Alokasi Dana Pekon (ADP);
   e. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
   f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
   g. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
   h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

3. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.

B. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan :

1. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan, yaitu :
   a. Camat sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
   b. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
   c. Sekretaris Kecamatan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan.

2. Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :
   a. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Pekon (ADP);
   b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
   c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk dicek silang dengan APB Pekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
   d. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);
   e. merekomendasi usulan pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   f. melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara adminstrasi, teknis dan hukum; dan
   g. menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing.
3. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran.

VI. TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TPTPKP)

1. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) ditetapkan dengan Keputusan Peratin dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
   a. peratin sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
   b. juru Tulis sebagai Koordinator Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
   c. para Kepala Urusan sebagai anggota Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).
   d. bendahara Pekon yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);

2. Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah sebagai berikut :
   a. menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang APBP;
   b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
   c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);

d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan; dan
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

VII. VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dimaksudkan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
2. Verifikasi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
3. Verifikasi dimaksud untuk mengetahui kesesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi/Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

I. PENGGUNAAN ADP

1. Belanja Aparatur dan Operasional sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari ADP digunakan untuk :
   a. Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang besarannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kemampuan keuangan Pekon, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) serendah-rendahnya sama dengan besaran yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013;
   b. Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) yang terdiri dari Juru Tulis selaku koordinator dan perangkat Pekon lainnya (Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum) sebagai anggota dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) diberikan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan sebesar :
      1. Penanggungjawab, 1 Org x 12 bln : Rp. 35.000,-
      2. Koordinator, 1 Org x 12 bln : Rp. 30.000,-
      3. Anggota, 3 Org x 12 bln : Rp. 25.000,-
   c. Honor Bendahara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Peratin diberikan honor sebesar Rp. 75.000,-/ bulan selama 12 (dua belas) bulan;
   d. Biaya Operasional Pemerintah Pekon, yang ditetapkan dalam musyawarah Pekon dengan memperhatikan azas kepatutan dan efisiensi anggaran serta memperhatikan kondisi Pekon dan kepentingan publik yang lebih besar, antara lain :
      1. Pengadaan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
      2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
      3. Biaya Operasional Lembaga Himpun Pemekonan (LHP); dan
      4. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) digunakan untuk :
   a. Bantuan Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melampirkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan;

b. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);

c. Bantuan Biaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pekon paling banyak sebesar 10% (sepuluh prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik ADP dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan PKK Pekon;

d. Bantuan Biaya Kegiatan Posyandu Pekon paling banyak sebesar 5% (lima prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan melampirkan SK Peratin tentang Pembentukan Tim Pokja Posyandu Pekon dan SK Kader Posyandu Pekon;

e. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Pelaksanaan dan Personil yang diikutsertakan dalam Pelatihan sabagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan Aparatur Pekon maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

f. Bantuan Biaya Operasional LPMP Pekon paling banyak sebesar 10% (sepuluh prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik ADP dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan Pengurus LPMP di Pekon masing-masing;

g. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);

h. Biaya penyertaan permodalan peningkatan pendapatan Pekon dan pendapatan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) yang berbadan hukum dan sudah berproduksi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan melampirkan Surat Izin Gangguan (RIG), SITU, SIUP, TDP dan Neraca Keuangan Usaha Milik Pekon;

i. Menunjang Peningkatan Pembangunan infrastruktur Pekon, dilengkapi dengan gambar, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan setelah selesai diberikan tanda tulisan nama kegiatan sesuai dengan tahun berjalan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);

j. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Peratin paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

k. Bantuan Biaya Lomba Pekon Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan melampirkan SK Peratin tentang Tim Perlombaan Pekon;

l. Bantuan Biaya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Pekon dan bukti-bukti lain pelaksanaan kegiatan;

m. Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Karang Taruna Pekon, Masyarakat Adat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Pekon paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang Pembentukan Karang Taruna dan bukti-bukti lain;

n. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), disertai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan dilampiri gambar sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan;

o. Biaya Pengadaan Ketahanan Pangan / Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Pekon dapat dicadangkan (dana cadangan) yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon, baik penerimaan maupun pengeluarannya dan dapat berkelanjutan;

p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);

q. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pelantikan Peratin Hasil Pemilihan paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

r. Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan yang ada di Pekon paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan bukti-bukti lainnya;

s. Biaya penyediaan bahan bacaan untuk Pekon sebesar-besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud Pasal 9, tidak diperbolehkan penggunaannya untuk :
   a. Ganti Rugi Tanah;
   b. Bangunan-Bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi (Tugu Batas Desa, Gapura dan Taman);
   c. Pengadaan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
   d. Peratin sebagai pelaksana kegiatan fisik dan non fisik;
   e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari Belanja Pemberdayaan Masyarakat tidak mengabaikan kegiatan non fisik Pemberdayaan Masyarakat lainnya berdasarkan skala prioritas; dan
   f. Bendahara Pekon tidak diperbolehkan membayarkan uang dari Kas Pekon tanpa perintah tertulis dari Peratin (selaku Penanggungjawab TPTPKP) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Koordinator Tim (Juru Tulis) sesuai dengan kebutuhan saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

II. STANDAR SATUAN HARGA

Mekanisme pembuatan Keputusan Peratin tentang Patokan Harga Satuan Pekerjaan per Kegiatan dan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan serta Upah Pekerja di Pekon :

a. Pemerintah Pekon melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai 5 (lima) toko;

b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam musyawarah Peratin dengan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan keputusan Peratin;
c. Keputusan Peratin tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Pekon; dan
d. Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di Pekon dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).

IV. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

1. Pengajuan Tahap I (kesatu) dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan :
   a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
   b. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.2** Peraturan Bupati ini;
   c. Keputusan Peratin tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan SK Peratin tentang Pengangkatan Bendahara Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.4** Peraturan Bupati ini;
   d. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.5** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
   e. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.5.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
   f. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) Tahap I (kesatu) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.6** Peraturan Bupati ini;
   g. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) yang akan dilaksanakan pada Tahap I (kesatu) dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.6.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

h. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Besaran Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.8** Peraturan Bupati ini;

i. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dana Tahap I (kesatu) yang dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan ditandatangani dan distempel Peratin di atas Meterai 6000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.10** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

j. Foto copy Buku Rekening Bank Pekon pada Bank yang ditunjuk dan dilegalisir Peratin;

k. Foto copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin;

l. Foto copy KTP Peratin dan Bendahara yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;

m. Kwitansi Penerimaan Alokasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani dan distempel Peratin di atas Meterai 6000 (C.5) sebagaimana **Lampiran II.12** Peraturan Bupati ini;

n. Surat kuasa Peratin tentang Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebanyak 5 (lima) rangkap;

o. Berita acara hasil verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat di atas Meterai 6.000 sebagaimana **Lampiran II.13** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap; dan

p. Usul yang dimaksud pada huruf a di atas, diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya, setelah ditetapkannya Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon.

2. Pengajuan Tahap II (kedua) dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan :

a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;

b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Tahap I (kesatu) pada Tahun Anggaran Berjalan;

c. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) Tahap II (kedua) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.7** Peraturan Bupati ini;

d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) yang akan dilaksanakan pada Tahap II (kedua) dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.7.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

e. Daftar tanda terima Pembayaran Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) (dari bulan Januari s.d bulan berjalan diSPJkan) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.8.2** Peraturan Bupati ini;

f. Daftar Tanda Terima Pembayaran Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dari bulan Januari 2013 s.d bulan berjalan di SPJkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.9** Peraturan Bupati ini;

g. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dana Tahap II (kedua) yang dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan, ditandatangani dan distempel Peratin di atas Meterai 6000 yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.10** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap, selambat-lambatnya Minggu Kedua Bulan Desember Tahun Anggaran 2013;

h. Kwitansi Penerimaan Alokasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani dan distempel Peratin di atas Meterai 6000 (C.5) sebagaimana **Lampiran II.12** Peraturan Bupati ini;

i. Berita Acara Hasil Verifikasi / Penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat di atas Meterai 6.000 sebagaimana **Lampiran II.13** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap.

j. Bukti Setor PPN/PPh Tahap I (kesatu) Tahun Anggaran 2013 kepada Kas Negara sebagaimana terlampir dalam **Lampiran II.14** Peraturan Bupati ini;

k. Buku Kas Umum (BKU) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.15** Peraturan Bupati ini; dan

l. Surat kuasa Peratin tentang Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebanyak 5 (lima) rangkap;

m. Foto copy KTP Peratin dan Bendahara yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;

V. PENGENAAN PAJAK

1. Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah / Kas Pekon dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) diberikan secara penuh dan utuh ke Pekon tanpa pajak dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pekon; dan
3. Kewajiban pajak atas penggunaan Dana Alokasi Pekon (ADP) tersebut disetorkan oleh Peratin selaku penanggungjawab kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN SEBELUMNYA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dipergunakan untuk :

a. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
b. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan tahun anggaran belum diselesaikan;
c. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
d. Dana tersebut dibukukan dalam Rekening Kas Pekon dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BESARAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) PADA 247 PEKON
UNTUK ALOKASI DANA PEKON MINIMAL (ADPM) DAN
ALOKASI DANA PEKON PROPORSIONAL (ADPP)

NO		KECAMATAN PEKON / KELURAHAN	JUMLAH ADP (Rupiah)	DPKPPx 60% (Rupiah)	DPKPM 40% (Rupiah)
1		*2*	*3*	*4*	*5*
	I	**SUMBERJAYA**			
1	1	Simpang Sari	81,749,378	49,049,627	32,699,751
2	2	Sukapura	80,651,028	48,390,617	32,260,411
3	3	Way Petai	91,324,844	54,794,906	36,529,938
4	4	SukaJaya	78,471,145	47,082,687	31,388,458
5	5	Sindang Pagar	77,985,659	46,791,396	31,194,264
6	***6***	Tugu Sari	Kelurahan		
	II	**KEBUN TEBU**			
7	1	Tribudi Syukur	73,518,988	44,111,393	29,407,595
8	2	Pura Jaya	81,462,312	48,877,387	32,584,925
9	3	Muara Jaya I	70,436,784	42,262,070	28,174,714
10	4	Muara Jaya II	70,257,797	42,154,678	28,103,119
11	5	Purawiwitan	79,840,862	47,904,517	31,936,345
12	6	Sinar Luas	71,491,149	42,894,689	28,596,460
13	7	Cipta Mulya	71,466,623	42,879,974	28,586,649
14	8	Tugu Mulya	70,816,585	42,489,951	28,326,634
15	9	Muara Baru	72,395,146	43,437,088	28,958,058
16	10	Tribudi Makmur	73,382,792	44,029,675	29,353,117
	III	**GEDUNG SURIAN**			
17	1	Gedung Surian	81,584,445	48,950,667	32,633,778
18	2	Tri Mulyo	79,554,946	47,732,968	31,821,978
19	3	Cipta Waras	69,479,489	41,687,693	27,791,796
20	4	Pura Mekar	86,685,276	52,011,165	34,674,110
21	5	Mekar Jaya	79,811,282	47,886,769	31,924,513
	IV	**WAY TENONG**			
22	1	Puralaksana	71,900,129	43,140,077	28,760,052
23	2	Karang Agung	61,469,994	36,881,997	24,587,998
24	3	Mutar Alam	66,074,271	39,644,563	26,429,708
25	4	Tanjung Raya	61,433,658	36,860,195	24,573,463
26	5	Sukananti	77,213,275	46,327,965	30,885,310
27	6	Sukaraja	63,509,760	38,105,856	25,403,904
28	7	Padang Tambak	72,949,521	43,769,713	29,179,809
29	8	Tambak Jaya	64,245,160	38,547,096	25,698,064
30	***9***	Fajar Bulan	Kelurahan		
	V	**AIR HITAM**			
31	1	Sri Menanti	61,362,089	36,817,253	24,544,836
32	2	Suka Damai	73,117,370	43,870,422	29,246,948
33	3	Manggarai	61,642,009	36,985,205	24,656,804
34	4	Rigis Jaya	64,866,385	38,919,831	25,946,554
35	5	Sinar Jaya	76,260,710	45,756,426	30,504,284
36	6	Sidodadi	61,491,181	36,894,709	24,596,472
37	7	Semarang Jaya	72,116,758	43,270,055	28,846,703
38	8	Sumber Alam	63,859,716	38,315,830	25,543,886
39	9	Gunung Terang	72,251,124	43,350,675	28,900,450
40	10	Sukajadi	73,704,735	44,222,841	29,481,894

	VI	**SEKINCAU**			
41	1	Pampangan	86,746,873	52,048,124	34,698,749
42	2	Giham Sukamaju	82,280,830	49,368,498	32,912,332
43	***3***	Sekincau	Kelurahan		
44	4	Waspada	65,012,233	39,007,340	26,004,893
45	5	Tiga Jaya	70,301,422	42,180,853	28,120,569
	VII	**PAGAR DEWA**			
46	1	Mekar Sari	61,775,672	37,065,403	24,710,269
47	2	Sidomulyo	80,325,064	48,195,038	32,130,025
48	3	Pahayu Jaya	73,418,600	44,051,160	29,367,440
49	4	Basungan	73,455,009	44,073,005	29,382,004
50	5	Sidodadi	64,968,606	38,981,163	25,987,442
51	6	Batu Api	64,627,375	38,776,425	25,850,950
52	7	Suka Jaya	65,324,752	39,194,851	26,129,901
53	8	Pagar Dewa	68,027,480	40,816,488	27,210,992
54	9	Suka Mulya	62,583,510	37,550,106	25,033,404
55	10	Marga Jaya	71,182,805	42,709,683	28,473,122
	VIII	**SUOH**			
56	1	Tuguratu	81,341,151	48,804,691	32,536,460
57	2	Sukamarga	75,987,644	45,592,586	30,395,058
58	3	Sumber Agung	75,675,488	45,405,293	30,270,195
59	4	Banding Agung	80,015,723	48,009,434	32,006,289
60	5	Roworejo	83,528,148	50,116,889	33,411,259
61	6	Sido Rejo	81,132,458	48,679,475	32,452,983
62	7	Ringin Sari	76,905,242	46,143,145	30,762,097
	IX	**BANDAR NEGERI SUOH**			
63	1	Bandar Agung	130,606,650	78,363,990	52,242,660
64	2	Srimulyo	75,409,466	45,245,679	30,163,786
65	3	Suoh	101,321,493	60,792,896	40,528,597
66	4	Bumi Hantatai	87,291,994	52,375,196	34,916,798
67	5	Gunung Ratu	69,125,125	41,475,075	27,650,050
68	6	Ringin Jaya	74,730,361	44,838,217	29,892,144
69	7	Tri Mekar Jaya	78,091,536	46,854,922	31,236,615
70	8	Tembelang	61,367,885	36,820,731	24,547,154
71	9	Negeri Jaya	79,867,978	47,920,787	31,947,191
72	10	Tanjung Sari	70,885,009	42,531,005	28,354,004
	X	**BELALAU**			
73	1	Kenali	76,736,181	46,041,709	30,694,472
74	2	Kejadian	54,066,905	32,440,143	21,626,762
75	3	Bumi Agung	68,681,548	41,208,929	27,472,619
76	4	Turgak	53,478,416	32,087,049	21,391,366
77	5	Bedudu	54,512,640	32,707,584	21,805,056
78	6	Sukarame	59,567,354	35,740,412	23,826,941
79	7	Hujung	70,852,236	42,511,341	28,340,894
80	8	Serungkuk	60,555,044	36,333,027	24,222,018
81	9	Suka Makmur	77,806,211	46,683,727	31,122,485
82	10	Pajar Agung	67,926,259	40,755,756	27,170,504
	XI	**BATU KETULIS**			
83	1	Bakhu	81,102,633	48,661,580	32,441,053
84	2	Luas	84,851,401	50,910,841	33,940,561
85	3	Argo Mulyo	77,082,712	46,249,627	30,833,085
86	4	Batu Kebayan	68,326,455	40,995,873	27,330,582
87	5	Atar Bawang	56,562,175	33,937,305	22,624,870

88	6	Campang Tiga	78,956,827	47,374,096	31,582,731
89	7	Way Ngison	64,791,183	38,874,710	25,916,473
90	8	Kubu Liku Jaya	57,792,076	34,675,246	23,116,831
91	9	Sumber Rejo	61,309,360	36,785,616	24,523,744
92	10	Atar Kuwau	66,015,142	39,609,085	26,406,057
	XII	**BATU BRAK**			
93	1	Negeri Ratu	55,326,383	33,195,830	22,130,553
94	2	Kembahang	75,592,567	45,355,540	30,237,027
95	3	Sukaraja	52,426,365	31,455,819	20,970,546
96	4	Gunung Sugih	55,947,885	33,568,731	22,379,154
97	5	Kegeringan	68,854,139	41,312,483	27,541,656
98	6	Canggu	56,534,090	33,920,454	22,613,636
99	7	Kota Besi	74,755,091	44,853,055	29,902,036
100	8	Sukabumi	65,983,422	39,590,053	26,393,369
101	9	Pekon Balak	59,092,761	35,455,656	23,637,104
102	10	Kerang	64,674,599	38,804,759	25,869,840
103	11	Teba Liokh	57,593,542	34,556,125	23,037,417
	XIII	**SUKAU**			
104	1	Tanjung Raya	84,357,491	50,614,494	33,742,996
105	2	Hanakau	70,917,154	42,550,292	28,366,862
106	3	Buay Nyerupa	81,229,963	48,737,978	32,491,985
107	4	Tapak Siring	74,215,653	44,529,392	29,686,261
108	5	Pagar Dewa	71,041,775	42,625,065	28,416,710
109	6	Jaga Raga	69,282,548	41,569,529	27,713,019
110	7	Suka Mulya	66,336,290	39,801,774	26,534,516
111	8	Bandar Baru	66,765,585	40,059,351	26,706,234
112	9	Bumi Jaya	64,262,210	38,557,326	25,704,884
113	10	Teba Pering Raya	67,319,768	40,391,861	26,927,907
	XIX	**LUMBOK SEMINUNG**			
114	1	Suka Banjar	67,912,209	40,747,325	27,164,884
115	2	Lombok	61,867,856	37,120,714	24,747,142
116	3	Heni Arong	62,216,701	37,330,021	24,886,681
117	4	Suka Banjar II UR	69,796,413	41,877,848	27,918,565
118	5	Lombok Timur	53,369,611	32,021,767	21,347,844
119	6	Tawan Suka Mulya	58,679,009	35,207,406	23,471,604
120	7	Ujung	50,537,612	30,322,567	20,215,045
121	8	Kagungan	50,617,535	30,370,521	20,247,014
122	9	Suka Maju	51,602,960	30,961,776	20,641,184
123	10	Lombok Selatan	53,159,218	31,895,531	21,263,687
124	11	Pancur Mas	59,546,982	35,728,189	23,818,793
	XV	**PESISIR TENGAH**			
125	1	Way Redak	60,591,067	36,354,640	24,236,427
126	2	Seray	61,654,914	36,992,949	24,661,966
127	3	Kampung Jawa	67,033,542	40,220,125	26,813,417
128	4	Rawas	62,292,262	37,375,357	24,916,905
129	5	Suka Negara	61,018,714	36,611,229	24,407,486
130	6	Pahmungan	62,287,280	37,372,368	24,914,912
131	***7***	Pasar Krui	Kelurahan		
132	***8***	Pasar Kota Krui	Kelurahan		
	XVI	**WAY KRUI**			
133	1	Pajar Bulan	50,594,012	30,356,407	20,237,605
134	2	Bumi Waras	50,711,157	30,426,694	20,284,463
135	3	Penggawa Lima Ilir	52,875,524	31,725,314	21,150,210

136	4	Banjar Agung	50,988,001	30,592,800	20,395,200
137	5	Ulu Krui	59,613,857	35,768,314	23,845,543
138	6	Gunung Kemala	56,763,823	34,058,294	22,705,529
139	7	Suka Baru	57,121,676	34,273,006	22,848,671
140	8	Labuhan Mandi	59,938,517	35,963,110	23,975,407
141	9	Gunung Kemala Timur	56,458,265	33,874,959	22,583,306
142	10	Penggawa Lima	51,451,915	30,871,149	20,580,766
	XVII	**KRUI SELATAN**			
143	1	Balai Kencana	65,879,349	39,527,609	26,351,739
144	2	Way Suluh	57,346,317	34,407,790	22,938,527
145	3	Way Napal	58,365,796	35,019,478	23,346,319
146	4	Padang Haluan	61,178,116	36,706,869	24,471,246
147	5	Lintik	57,725,620	34,635,372	23,090,248
148	6	Walur	54,590,293	32,754,176	21,836,117
149	7	Pemerihan	54,747,757	32,848,654	21,899,103
150	8	Mandiri Sejati	50,402,309	30,241,385	20,160,923
151	9	Padang Raya	55,159,881	33,095,929	22,063,953
152	10	Sukajadi	52,773,856	31,664,314	21,109,543
	XVIII	**PESISIR SELATAN**			
153	1	NR Tenumbang	65,998,814	39,599,288	26,399,526
154	2	Sukarame	62,020,971	37,212,583	24,808,389
155	3	Pelita Jaya	61,198,560	36,719,136	24,479,424
156	4	Sumur Jaya	64,830,884	38,898,530	25,932,353
157	5	Tanjung Jati	52,657,419	31,594,452	21,062,968
158	6	Pagar Dalam	61,635,668	36,981,401	24,654,267
159	7	Tanjung Setia	67,389,696	40,433,818	26,955,878
160	8	Biha	75,721,432	45,432,859	30,288,573
161	9	Way Jambu	68,490,807	41,094,484	27,396,323
162	10	Marang	116,756,138	70,053,683	46,702,455
163	11	Tanjung Raya	66,089,472	39,653,683	26,435,789
164	12	Bangun Negara	75,613,622	45,368,173	30,245,449
165	13	Ulok Manik	61,681,394	37,008,836	24,672,557
166	14	Paku Negara	66,718,037	40,030,822	26,687,215
167	15	Tulung Bamban	62,288,183	37,372,910	24,915,273
	XIX	**PESISIR UTARA**			
168	1	Walur	58,011,099	34,806,659	23,204,439
169	2	Padang Rindu	58,608,782	35,165,269	23,443,513
170	3	Kuripan	61,893,766	37,136,259	24,757,506
171	4	Negeri Ratu	55,745,299	33,447,179	22,298,119
172	5	Kerbang Langgar	57,578,233	34,546,940	23,031,293
173	6	Kerbang Dalam	56,505,622	33,903,373	22,602,249
174	7	Balam	56,294,234	33,776,541	22,517,694
175	8	Way Narta	51,769,664	31,061,798	20,707,866
176	9	Kota Karang	54,504,145	32,702,487	21,801,658
177	10	Batu Raja	56,806,759	34,084,055	22,722,703
178	11	Pemancar	56,921,624	34,152,974	22,768,650
179	12	Gedau	60,298,478	36,179,087	24,119,391
	XX	**PULAU PISANG**			
180	1	Pasar Pulau Pisang	61,155,165	36,693,099	24,462,066
181	2	Labuhan	59,076,370	35,445,822	23,630,548
182	3	Sukadana	58,124,953	34,874,972	23,249,981
183	4	Sukamarga	56,984,356	34,190,614	22,793,742
184	5	Pekon Lok	56,306,390	33,783,834	22,522,556
185	6	Bandar Dalam	57,216,718	34,330,031	22,886,687

	XXI	**LEMONG**			
186	1	Pagar Dalam	68,489,524	41,093,714	27,395,810
187	2	Bambang	63,067,066	37,840,239	25,226,826
188	3	Tanjung Jati	61,738,223	37,042,934	24,695,289
189	4	Way Batang	67,573,706	40,544,223	27,029,482
190	5	Rata Agung	81,179,293	48,707,576	32,471,717
191	6	Lemong	80,185,673	48,111,404	32,074,269
192	7	Penengahan	76,070,249	45,642,149	30,428,100
193	8	Malaya	78,059,637	46,835,782	31,223,855
194	9	Cahaya Negeri	65,401,755	39,241,053	26,160,702
195	10	Bandar Pugung	74,983,641	44,990,184	29,993,456
196	11	Tanjung Sakti	57,865,226	34,719,136	23,146,090
197	12	Suka Mulya	67,510,599	40,506,359	27,004,239
198	13	Parda Haga	63,099,880	37,859,928	25,239,952
	XXII	**KARYA PENGGAWA**			
199	1	Menyancang	60,300,534	36,180,321	24,120,214
200	2	Penggawa V Tengah	55,185,650	33,111,390	22,074,260
201	3	La'ay	57,723,896	34,634,338	23,089,558
202	4	Penggawa V Ulu	63,061,439	37,836,863	25,224,576
203	5	Penengahan	67,754,125	40,652,475	27,101,650
204	6	Kebuayan	56,644,099	33,986,459	22,657,640
205	7	Way Nukak	62,087,942	37,252,765	24,835,177
206	8	Way Sindi	67,815,945	40,689,567	27,126,378
207	9	Way Sindi Utara	57,687,716	34,612,630	23,075,086
208	10	Tembakak Way Sindi	61,528,236	36,916,941	24,611,294
209	11	Way Sindi Hanuan	70,683,267	42,409,960	28,273,307
210	12	Asahan Way Sindi	62,702,040	37,621,224	25,080,816
	XXIII	**BALIK BUKIT**			
211	1	Bahway	86,740,221	52,044,133	34,696,088
212	2	Padang Dalom	64,339,053	38,603,432	25,735,621
213	3	Sukarame	82,214,590	49,328,754	32,885,836
214	4	Sebarus	75,605,098	45,363,059	30,242,039
215	5	Watas	70,407,425	42,244,455	28,162,970
216	6	Way Empulau Ulu	70,309,157	42,185,494	28,123,663
217	7	Gunung Sugih	71,004,850	42,602,910	28,401,940
218	***8***	Pasar Liwa	Kelurahan		
219	9	Kubu Perahu	67,733,410	40,640,046	27,093,364
220	10	Padang Cahya	102,507,304	61,504,382	41,002,922
221	***11***	Way Mengaku	Kelurahan		
222	12	Sedampah Indah	70,647,508	42,388,505	28,259,003
	XXIV	**BENGKUNAT**			
223	1	Parda Suka	59,536,513	35,721,908	23,814,605
224	2	Negeri Ratu Ngaras	57,443,942	34,466,365	22,977,577
225	3	Kota Batu	60,155,524	36,093,314	24,062,210
226	4	Mulang Maya	66,395,015	39,837,009	26,558,006
227	5	Raja Basa	62;945,966	37,767,580	25,178,386
228	6	Padang Dalam	60,314,946	36,188,968	24,125,978
229	7	Suka Maju	63,893,998	38,336,399	25,557,599
230	8	Sukarame	60,461,588	36,276,953	24,184,635
231	9	Bandar Jaya	57,803,541	34,682,124	23,121,416
	XXV	**NGAMBUR**			
232	1	Sumber Agung	90,216,671	54,130,002	36,086,668
233	2	Ulok Mukti	80,638,583	48,383,150	32,255,433
234	3	Negeri Ratu Ngambur	87,502,467	52,501,480	35,000,987
235	4	Pekon Mon	85,102,426	51,061,456	34,040,971

236	5	Gedung Cahaya Kuningan	80,813,018	48,487,811	32,325,207
237	6	Suka Banjar	88,215,905	52,929,543	35,286,362
238	7	Suka Negara	70,526,260	42,315,756	28,210,504
239	8	Muara Tembulih	62,327,941	37,396,764	24,931,176
240	9	Bumi Ratu	82,412,919	49,447,751	32,965,167
	XXVI	**BENGKUNAT BELIMBING**			
241	1	Pagar Bukit	131,687,549	79,012,530	52,675,020
242	2	Tanjung Kemala	75,083,502	45,050,101	30,033,401
243	3	Suka Marga	85,197,013	51,118,208	34,078,805
244	4	Kota Jawa	87,134,463	52,280,678	34,853,785
245	5	Penyandingan	71,266,390	42,759,834	28,506,556
246	6	Bandar Dalam	87,608,309	52,564,985	35,043,324
247	7	Way Haru	85,653,927	51,392,356	34,261,571
248	8	Pemerihan	79,832,431	47,899,459	31,932,972
249	9	Suka Negeri	71,943,852	43,166,311	28,777,541
250	10	Sumberejo	71,135,380	42,681,228	28,454,152
251	11	Siring Gading	77,322,589	46,393,553	30,929,035
252	12	Way Tias	81,783,740	49,070,244	32,713,496
253	13	Tanjung Rejo	67,224,851	40,334,911	26,889,941
254	14	Pagar Bukit Induk	71,745,427	43,047,256	28,698,171
	JUMLAH		16,901,627,300	10,140,976,380	6,760,650,920

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BESARAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) PADA 247 PEKON
UNTUK ALOKASI DANA PEKON (ADP) / (30%) DAN
ALOKASI DANA PEKON (ADP) / (70%)

NO		KECAMATAN	JUMLAH	DPKPPx	DPKPM
		PEKON / KELURAHAN	ADP (Rupiah)	70% (Rupiah)	30% (Rupiah)
1		*2*	*3*	*4*	*5*
	I	**SUMBERJAYA**			
1	1	Simpang Sari	81,749,378	57,224,565	24,524,813
2	2	Sukapura	80,651,028	56,455,720	24,195,309
3	3	Way Petai	91,324,844	63,927,391	27,397,453
4	4	SukaJaya	78,471,145	54,929,802	23,541,344
5	5	Sindang Pagar	77,985,659	54,589,962	23,395,698
6	***6***	Tugu Sari	Kelurahan		
	II	**KEBUN TEBU**			
7	1	Tribudi Syukur	73,518,988	51,463,291	22,055,696
8	2	Pura Jaya	81,462,312	57,023,619	24,438,694
9	3	Muara Jaya I	70,436,784	49,305,749	21,131,035
10	4	Muara Jaya II	70,257,797	49,180,458	21,077,339
11	5	Purawiwitan	79,840,862	55,888,604	23,952,259
12	6	Sinar Luas	71,491,149	50,043,804	21,447,345
13	7	Cipta Mulya	71,466,623	50,026,636	21,439,987
14	8	Tugu Mulya	70,816,585	49,571,610	21,244,976
15	9	Muara Baru	72,395,146	50,676,602	21,718,544
16	10	Tribudi Makmur	73,382,792	51,367,954	22,014,838
	III	**GEDUNG SURIAN**			
17	1	Gedung Surian	81,584,445	57,109,112	24,475,334
18	2	Tri Mulyo	79,554,946	55,688,462	23,866,484
19	3	Cipta Waras	69,479,489	48,635,642	20,843,847
20	4	Pura Mekar	86,685,276	60,679,693	26,005,583
21	5	Mekar Jaya	79,811,282	55,867,897	23,943,384
	IV	**WAY TENONG**			
22	1	Puralaksana	71,900,129	50,330,090	21,570,039
23	2	Karang Agung	61,469,994	43,028,996	18,440,998
24	3	Mutar Alam	66,074,271	46,251,990	19,822,281
25	4	Tanjung Raya	61,433,658	43,003,561	18,430,097
26	5	Sukananti	77,213,275	54,049,293	23,163,983
27	6	Sukaraja	63,509,760	44,456,832	19,052,928
28	7	Padang Tambak	72,949,521	51,064,665	21,884,856
29	8	Tambak Jaya	64,245,160	44,971,612	19,273,548
30	***9***	Fajar Bulan	Kelurahan		
	V	**AIR HITAM**			
31	1	Sri Menanti	61,362,089	42,953,462	18,408,627
32	2	Suka Damai	73,117,370	51,182,159	21,935,211
33	3	Manggarai	61,642,009	43,149,406	18,492,603
34	4	Rigis Jaya	64,866,385	45,406,470	19,459,916
35	5	Sinar Jaya	76,260,710	53,382,497	22,878,213
36	6	Sidodadi	61,491,181	43,043,827	18,447,354
37	7	Semarang Jaya	72,116,758	50,481,731	21,635,027
38	8	Sumber Alam	63,859,716	44,701,801	19,157,915
39	9	Gunung Terang	72,251,124	50,575,787	21,675,337
40	10	Sukajadi	73,704,735	51,593,315	22,111,421

	VI	**SEKINCAU**			
41	1	Pampangan	86,746,873	60,722,811	26,024,062
42	2	Giham Sukamaju	82,280,830	57,596,581	24,684,249
43	***3***	Sekincau	Kelurahan		
44	4	Waspada	65,012,233	45,508,563	19,503,670
45	5	Tiga Jaya	70,301,422	49,210,996	21,090,427
	VII	**PAGAR DEWA**			
46	1	Mekar Sari	61,775,672	43,242,970	18,532,701
47	2	Sidomulyo	80,325,064	56,227,545	24,097,519
48	3	Pahayu Jaya	73,418,600	51,393,020	22,025,580
49	4	Basungan	73,455,009	51,418,506	22,036,503
50	5	Sidodadi	64,968,606	45,478,024	19,490,582
51	6	Batu Api	64,627,375	45,239,163	19,388,213
52	7	Suka Jaya	65,324,752	45,727,326	19,597,426
53	8	Pagar Dewa	68,027,480	47,619,236	20,408,244
54	9	Suka Mulya	62,583,510	43,808,457	18,775,053
55	10	Marga Jaya	71,182,805	49,827,963	21,354,841
	VIII	**SUOH**			
56	1	Tuguratu	81,341,151	56,938,806	24,402,345
57	2	Sukamarga	75,987,644	53,191,351	22,796,293
58	3	Sumber Agung	75,675,488	52,972,841	22,702,646
59	4	Banding Agung	80,015,723	56,011,006	24,004,717
60	5	Roworejo	83,528,148	58,469,704	25,058,444
61	6	Sido Rejo	81,132,458	56,792,720	24,339,737
62	7	Ringin Sari	76,905,242	53,833,669	23,071,573
	IX	**BANDAR NEGERI SUOH**			
63	1	Bandar Agung	130,606,650	91,424,655	39,181,995
64	2	Srimulyo	75,409,466	52,786,626	22,622,840
65	3	Suoh	101,321,493	70,925,045	30,396,448
66	4	Bumi Hantatai	87,291,994	61,104,396	26,187,598
67	5	Gunung Ratu	69,125,125	48,387,587	20,737,537
68	6	Ringin Jaya	74,730,361	52,311,253	22,419,108
69	7	Tri Mekar Jaya	78,091,536	54,664,075	23,427,461
70	8	Tembelang	61,367,885	42,957,519	18,410,365
71	9	Negeri Jaya	79,867,978	55,907,584	23,960,393
72	10	Tanjung Sari	70,885,009	49,619,506	21,265,503
	X	**BELALAU**			
73	1	Kenali	76,736,181	53,715,327	23,020,854
74	2	Kejadian	54,066,905	37,846,834	16,220,072
75	3	Bumi Agung	68,681,548	48,077,084	20,604,464
76	4	Turgak	53,478,416	37,434,891	16,043,525
77	5	Bedudu	54,512,640	38,158,848	16,353,792
78	6	Sukarame	59,567,354	41,697,148	17,870,206
79	7	Hujung	70,852,236	49,596,565	21,255,671
80	8	Serungkuk	60,555,044	42,388,531	18,166,513
81	9	Suka Makmur	77,806,211	54,464,348	23,341,863
82	10	Pajar Agung	67,926,259	47,548,381	20,377,878
	XI	**BATU KETULIS**			
83	1	Bakhu	81,102,633	56,771,843	24,330,790
84	2	Luas	84,851,401	59,395,981	25,455,420
85	3	Argo Mulyo	77,082,712	53,957,898	23,124,814
86	4	Batu Kebayan	68,326,455	47,828,518	20,497,936
87	5	Atar Bawang	56,562,175	39,593,523	16,968,653

88	6	Campang Tiga	78,956,827	55,269,779	23,687,048
89	7	Way Ngison	64,791,183	45,353,828	19,437,355
90	8	Kubu Liku Jaya	57,792,076	40,454,453	17,337,623
91	9	Sumber Rejo	61,309,360	42,916,552	18,392,808
92	10	Atar Kuwau	66,015,142	46,210,600	19,804,543
	XII	**BATU BRAK**			
93	1	Negeri Ratu	55,326,383	38,728,468	16,597,915
94	2	Kembahang	75,592,567	52,914,797	22,677,770
95	3	Sukaraja	52,426,365	36,698,456	15,727,910
96	4	Gunung Sugih	55,947,885	39,163,520	16,784,366
97	5	Kegeringan	68,854,139	48,197,897	20,656,242
98	6	Canggu	56,534,090	39,573,863	16,960,227
99	7	Kota Besi	74,755,091	52,328,564	22,426,527
100	8	Sukabumi	65,983,422	46,188,395	19,795,026
101	9	Pekon Balak	59,092,761	41,364,933	17,727,828
102	10	Kerang	64,674,599	45,272,219	19,402,380
103	11	Teba Liokh	57,593,542	40,315,479	17,278,062
	XIII	**SUKAU**			
104	1	Tanjung Raya	84,357,491	59,050,243	25,307,247
105	2	Hanakau	70,917,154	49,642,008	21,275,146
106	3	Buay Nyerupa	81,229,963	56,860,974	24,368,989
107	4	Tapak Siring	74,215,653	51,950,957	22,264,696
108	5	Pagar Dewa	71,041,775	49,729,243	21,312,533
109	6	Jaga Raga	69,282,548	48,497,783	20,784,764
110	7	Suka Mulya	66,336,290	46,435,403	19,900,887
111	8	Bandar Baru	66,765,585	46,735,909	20,029,675
112	9	Bumi Jaya	64,262,210	44,983,547	19,278,663
113	10	Teba Pering Raya	67,319,768	47,123,837	20,195,930
	XIX	**LUMBOK SEMINUNG**			
114	1	Suka Banjar	67,912,209	47,538,546	20,373,663
115	2	Lombok	61,867,856	43,307,499	18,560,357
116	3	Heni Arong	62,216,701	43,551,691	18,665,010
117	4	Suka Banjar II UR	69,796,413	48,857,489	20,938,924
118	5	Lombok Timur	53,369,611	37,358,728	16,010,883
119	6	Tawan Suka Mulya	58,679,009	41,075,307	17,603,703
120	7	Ujung	50,537,612	35,376,329	15,161,284
121	8	Kagungan	50,617,535	35,432,274	15,185,260
122	9	Suka Maju	51,602,960	36,122,072	15,480,888
123	10	Lombok Selatan	53,159,218	37,211,453	15,947,765
124	11	Pancur Mas	59,546,982	41,682,887	17,864,095
	XV	**PESISIR TENGAH**			
125	1	Way Redak	60,591,067	42,413,747	18,177,320
126	2	Seray	61,654,914	43,158,440	18,496,474
127	3	Kampung Jawa	67,033,542	46,923,479	20,110,063
128	4	Rawas	62,292,262	43,604,584	18,687,679
129	5	Suka Negara	61,018,714	42,713,100	18,305,614
130	6	Pahmungan	62,287,280	43,601,096	18,686,184
131	***7***	Pasar Krui	Kelurahan		
132	***8***	Pasar Kota Krui	Kelurahan		
	XVI	**WAY KRUI**			
133	1	Pajar Bulan	50,594,012	35,415,808	15,178,204
134	2	Bumi Waras	50,711,157	35,497,810	15,213,347
135	3	Penggawa Lima Ilir	52,875,524	37,012,867	15,862,657

136	4	Banjar Agung	50,988,001	35,691,600	15,296,400
137	5	Ulu Krui	59,613,857	41,729,700	17,884,157
138	6	Gunung Kemala	56,763,823	39,734,676	17,029,147
139	7	Suka Baru	57,121,676	39,985,174	17,136,503
140	8	Labuhan Mandi	59,938,517	41,956,962	17,981,555
141	9	Gunung Kemala Timur	56,458,265	39,520,785	16,937,479
142	10	Penggawa Lima	51,451,915	36,016,340	15,435,574
	XVII	**KRUI SELATAN**			
143	1	Balai Kencana	65,879,349	46,115,544	19,763,805
144	2	Way Suluh	57,346,317	40,142,422	17,203,895
145	3	Way Napal	58,365,796	40,856,058	17,509,739
146	4	Padang Haluan	61,178,116	42,824,681	18,353,435
147	5	Lintik	57,725,620	40,407,934	17,317,686
148	6	Walur	54,590,293	38,213,205	16,377,088
149	7	Pemerihan	54,747,757	38,323,430	16,424,327
150	8	Mandiri Sejati	50,402,309	35,281,616	15,120,693
151	9	Padang Raya	55,159,881	38,611,917	16,547,964
152	10	Sukajadi	52,773,856	36,941,700	15,832,157
	XVIII	**PESISIR SELATAN**			
153	1	NR Tenumbang	65,998,814	46,199,170	19,799,644
154	2	Sukarame	62,020,971	43,414,680	18,606,291
155	3	Pelita Jaya	61,198,560	42,838,992	18,359,568
156	4	Sumur Jaya	64,830,884	45,381,618	19,449,265
157	5	Tanjung Jati	52,657,419	36,860,194	15,797,226
158	6	Pagar Dalam	61,635,668	43,144,967	18,490,700
159	7	Tanjung Setia	67,389,696	47,172,787	20,216,909
160	8	Biha	75,721,432	53,005,003	22,716,430
161	9	Way Jambu	68,490,807	47,943,565	20,547,242
162	10	Marang	116,756,138	81,729,297	35,026,841
163	11	Tanjung Raya	66,089,472	46,262,631	19,826,842
164	12	Bangun Negara	75,613,622	52,929,535	22,684,087
165	13	Ulok Manik	61,681,394	43,176,976	18,504,418
166	14	Paku Negara	66,718,037	46,702,626	20,015,411
167	15	Tulung Bamban	62,288,183	43,601,728	18,686,455
	XIX	**PESISIR UTARA**			
168	1	Walur	58,011,099	40,607,769	17,403,330
169	2	Padang Rindu	58,608,782	41,026,147	17,582,635
170	3	Kuripan	61,893,766	43,325,636	18,568,130
171	4	Negeri Ratu	55,745,299	39,021,709	16,723,590
172	5	Kerbang Langgar	57,578,233	40,304,763	17,273,470
173	6	Kerbang Dalam	56,505,622	39,553,935	16,951,687
174	7	Balam	56,294,234	39,405,964	16,888,270
175	8	Way Narta	51,769,664	36,238,765	15,530,899
176	9	Kota Karang	54,504,145	38,152,902	16,351,244
177	10	Batu Raja	56,806,759	39,764,731	17,042,028
178	11	Pemancar	56,921,624	39,845,137	17,076,487
179	12	Gedau	60,298,478	42,208,935	18,089,543
	XX	**PULAU PISANG**			
180	1	Pasar Pulau Pisang	61,155,165	42,808,616	18,346,550
181	2	Labuhan	59,076,370	41,353,459	17,722,911
182	3	Sukadana	58,124,953	40,687,467	17,437,486
183	4	Sukamarga	56,984,356	39,889,049	17,095,307
184	5	Pekon Lok	56,306,390	39,414,473	16,891,917
185	6	Bandar Dalam	57,216,718	40,051,703	17,165,016

	XXI	**LEMONG**			
186	1	Pagar Dalam	68,489,524	47,942,667	20,546,857
187	2	Bambang	63,067,066	44,146,946	18,920,120
188	3	Tanjung Jati	61,738,223	43,216,756	18,521,467
189	4	Way Batang	67,573,706	47,301,594	20,272,112
190	5	Rata Agung	81,179,293	56,825,505	24,353,788
191	6	Lemong	80,185,673	56,129,971	24,055,702
192	7	Penengahan	76,070,249	53,249,174	22,821,075
193	8	Malaya	78,059,637	54,641,746	23,417,891
194	9	Cahaya Negeri	65,401,755	45,781,228	19,620,526
195	10	Bandar Pugung	74,983,641	52,488,549	22,495,092
196	11	Tanjung Sakti	57,865,226	40,505,658	17,359,568
197	12	Suka Mulya	67,510,599	47,257,419	20,253,180
198	13	Parda Haga	63,099,880	44,169,916	18,929,964
	XXII	**KARYA PENGGAWA**			
199	1	Menyancang	60,300,534	42,210,374	18,090,160
200	2	Penggawa V Tengah	55,185,650	38,629,955	16,555,695
201	3	La'ay	57,723,896	40,406,727	17,317,169
202	4	Penggawa V Ulu	63,061,439	44,143,007	18,918,432
203	5	Penengahan	67,754,125	47,427,888	20,326,238
204	6	Kebuayan	56,644,099	39,650,869	16,993,230
205	7	Way Nukak	62,087,942	43,461,560	18,626,383
206	8	Way Sindi	67,815,945	47,471,161	20,344,783
207	9	Way Sindi Utara	57,687,716	40,381,401	17,306,315
208	10	Tembakak Way Sindi	61,528,236	43,069,765	18,458,471
209	11	Way Sindi Hanuan	70,683,267	49,478,287	21,204,980
210	12	Asahan Way Sindi	62,702,040	43,891,428	18,810,612
	XXIII	**BALIK BUKIT**			
211	1	Bahway	86,740,221	60,718,155	26,022,066
212	2	Padang Dalom	64,339,053	45,037,337	19,301,716
213	3	Sukarame	82,214,590	57,550,213	24,664,377
214	4	Sebarus	75,605,098	52,923,568	22,681,529
215	5	Watas	70,407,425	49,285,198	21,122,228
216	6	Way Empulau Ulu	70,309,157	49,216,410	21,092,747
217	7	Gunung Sugih	71,004,850	49,703,395	21,301,455
218	***8***	Pasar Liwa	Kelurahan		
219	9	Kubu Perahu	67,733,410	47,413,387	20,320,023
220	10	Padang Cahya	102,507,304	71,755,113	30,752,191
221	***11***	Way Mengaku	Kelurahan		
222	12	Sedampah Indah	70,647,508	49,453,255	21,194,252
	XXIV	**BENGKUNAT**			
223	1	Parda Suka	59,536,513	41,675,559	17,860,954
224	2	Negeri Ratu Ngaras	57,443,942	40,210,759	17,233,183
225	3	Kota Batu	60,155,524	42,108,867	18,046,657
226	4	Mulang Maya	66,395,015	46,476,511	19,918,505
227	5	Raja Basa	62,945,966	44,062,176	18,883,790
228	6	Padang Dalam	60,314,946	42,220,462	18,094,484
229	7	Suka Maju	63,893,998	44,725,799	19,168,199
230	8	Sukarame	60,461,588	42,323,111	18,138,476
231	9	Bandar Jaya	57,803,541	40,462,479	17,341,062
	XXV	**NGAMBUR**			
232	1	Sumber Agung	90,216,671	63,151,669	27,065,001
233	2	Ulok Mukti	80,638,583	56,447,008	24,191,575
234	3	Negeri Ratu Ngambur	87,502,467	61,251,727	26,250,740

235	4	Pekon Mon	85,102,426	59,571,698	25,530,728
236	5	Gedung Cahaya Kuningan	80,813,018	56,569,113	24,243,905
237	6	Suka Banjar	88,215,905	61,751,134	26,464,772
238	7	Suka Negara	70,526,260	49,368,382	21,157,878
239	8	Muara Tembulih	62,327,941	43,629,558	18,698,382
240	9	Bumi Ratu	82,412,919	57,689,043	24,723,876
	XXVI	**BENGKUNAT BELIMBING**			
241	1	Pagar Bukit	131,687,549	92,181,285	39,506,265
242	2	Tanjung Kemala	75,083,502	52,558,451	22,525,050
243	3	Suka Marga	85,197,013	59,637,909	25,559,104
244	4	Kota Jawa	87,134,463	60,994,124	26,140,339
245	5	Penyandingan	71,266,390	49,886,473	21,379,917
246	6	Bandar Dalam	87,608,309	61,325,816	26,282,493
247	7	Way Haru	85,653,927	59,957,749	25,696,178
248	8	Pemerihan	79,832,431	55,882,702	23,949,729
249	9	Suka Negeri	71,943,852	50,360,696	21,583,156
250	10	Sumberejo	71,135,380	49,794,766	21,340,614
251	11	Siring Gading	77,322,589	54,125,812	23,196,777
252	12	Way Tias	81,783,740	57,248,618	24,535,122
253	13	Tanjung Rejo	67,224,851	47,057,396	20,167,455
254	14	Pagar Bukit Induk	71,745,427	50,221,799	21,523,628
JUMLAH			**16,901,627,300**	**11,831,139,110**	**5,070,488,190**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BESARAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) PADA 247 PEKON
UNTUK 50% TAHAP I (KESATU) DAN 50% TAHAP II (KEDUA)

NO		KECAMATAN PEKON/KELURAHAN	JUMLAH ADP (Rupiah)	JUMLAH ADP (Pembulatan ke Bawah	JUMLAH ADP 50% (Rupiah)	JUMLAH ADP 50% (Rupiah)
1		*2*	*3*		*4*	*5*
	I	**SUMBERJAYA**				
1	1	Simpang Sari	81,749,378	81,749,350	40,874,675	40,874,675
2	2	Sukapura	80,651,028	80,651,000	40,325,500	40,325,500
3	3	Way Petai	91,324,844	91,324,800	45,662,400	45,662,400
4	4	SukaJaya	78,471,145	78,471,100	39,235,550	39,235,550
5	5	Sindang Pagar	77,985,659	77,985,650	38,992,825	38,992,825
6	***6***	Tugu Sari	Kelurahan			
	II	**KEBUN TEBU**				
7	1	Tribudi Syukur	73,518,988	73,518,950	36,759,475	36,759,475
8	2	Pura Jaya	81,462,312	81,462,300	40,731,150	40,731,150
9	3	Muara Jaya I	70,436,784	70,436,750	35,218,375	35,218,375
10	4	Muara Jaya II	70,257,797	70,257,750	35,128,875	35,128,875
11	5	Purawiwitan	79,840,862	79,840,850	39,920,425	39,920,425
12	6	Sinar Luas	71,491,149	71,491,100	35,745,550	35,745,550
13	7	Cipta Mulya	71,466,623	71,466,600	35,733,300	35,733,300
14	8	Tugu Mulya	70,816,585	70,816,550	35,408,275	35,408,275
15	9	Muara Baru	72,395,146	72,395,100	36,197,550	36,197,550
16	10	Tribudi Makmur	73,382,792	73,382,750	36,691,375	36,691,375
	III	**GEDUNG SURIAN**				
17	1	Gedung Surian	81,584,445	81,584,400	40,792,200	40,792,200
18	2	Tri Mulyo	79,554,946	79,554,900	39,777,450	39,777,450
19	3	Cipta Waras	69,479,489	69,479,450	34,739,725	34,739,725
20	4	Pura Mekar	86,685,276	86,685,750	43,342,875	43,342,875
21	5	Mekar Jaya	79,811,282	79,811,250	39,905,625	39,905,625
	IV	**WAY TENONG**				
22	1	Puralaksana	71,900,129	71,900,100	35,950,050	35,950,050
23	2	Karang Agung	61,469,994	61,469,950	30,734,975	30,734,975
24	3	Mutar Alam	66,074,271	66,074,250	33,037,125	33,037,125
25	4	Tanjung Raya	61,433,658	61,433,650	30,716,825	30,716,825
26	5	Sukananti	77,213,275	77,213,250	38,606,625	38,606,625
27	6	Sukaraja	63,509,760	63,509,500	31,754,750	31,754,750
28	7	Padang Tambak	72,949,521	72,949,500	36,474,750	36,474,750
29	8	Tambak Jaya	64,245,160	64,245,150	32,122,575	32,122,575
30	***9***	Fajar Bulan	Kelurahan			
	V	**AIR HITAM**				
31	1	Sri Menanti	61,362,089	61,362,050	30,681,025	30,681,025
32	2	Suka Damai	73,117,370	73,117,350	36,558,675	36,558,675
33	3	Manggarai	61,642,009	61,642,000	30,821,000	30,821,000
34	4	Rigis Jaya	64,866,385	64,866,350	32,433,175	32,433,175
35	5	Sinar Jaya	76,260,710	76,260,700	38,130,350	38,130,350
36	6	Sidodadi	61,491,181	61,491,150	30,745,575	30,745,575
37	7	Semarang Jaya	72,116,758	72,116,750	36,058,375	36,058,375
38	8	Sumber Alam	63,859,716	63,859,700	31,929,850	31,929,850
39	9	Gunung Terang	72,251,124	72,251,100	36,125,550	36,125,550
40	10	Sukajadi	73,704,735	73,704,700	36,852,350	36,852,350

	VI	**SEKINCAU**				
41	1	Pampangan	86,746,873	86,746,850	43,373,425	43,373,425
42	2	Giham Sukamaju	82,280,830	82,280,800	41,140,400	41,140,400
43	***3***	Sekincau	Kelurahan			
44	4	Waspada	65,012,233	65,012,200	32,506,100	32,506,100
45	5	Tiga Jaya	70,301,422	70,301,400	35,150,700	35,150,700
	VII	**PAGAR DEWA**				
46	1	Mekar Sari	61,775,672	61,775,650	30,887,825	30,887,825
47	2	Sidomulyo	80,325,064	80,325,050	40,162,525	40,162,525
48	3	Pahayu Jaya	73,418,600	73,418,600	36,709,300	36,709,300
49	4	Basungan	73,455,009	73,455,000	36,727,500	36,727,500
50	5	Sidodadi	64,968,606	64,968,600	32,484,300	32,484,300
51	6	Batu Api	64,627,375	64,627,350	32,313,675	32,313,675
52	7	Suka Jaya	65,324,752	65,324,750	32,662,375	32,662,375
53	8	Pagar Dewa	68,027,480	68,027,450	34,013,725	34,013,725
54	9	Suka Mulya	62,583,510	62,583,500	31,291,750	31,291,750
55	10	Marga Jaya	71,182,805	71,182,800	35,591,400	35,591,400
	VIII	**SUOH**				
56	1	Tuguratu	81,341,151	81,341,150	40,670,575	40,670,575
57	2	Sukamarga	75,987,644	75,987,600	37,993,800	37,993,800
58	3	Sumber Agung	75,675,488	75,675,450	37,837,725	37,837,725
59	4	Banding Agung	80,015,723	80,015,700	40,007,850	40,007,850
60	5	Roworejo	83,528,148	83,528,100	41,764,050	41,764,050
61	6	Sido Rejo	81,132,458	81,132,450	40,566,225	40,566,225
62	7	Ringin Sari	76,905,242	76,905,200	38,452,600	38,452,600
	IX	**BANDAR NEGERI SUOH**				
63	1	Bandar Agung	130,606,650	130,606,650	65,303,325	65,303,325
64	2	Srimulyo	75,409,466	75,409,450	37,704,725	37,704,725
65	3	Suoh	101,321,493	101,321,450	50,660,725	50,660,725
66	4	Bumi Hantatai	87,291,994	87,291,950	43,645,975	43,645,975
67	5	Gunung Ratu	69,125,125	69,125,100	34,562,550	34,562,550
68	6	Ringin Jaya	74,730,361	74,730,650	37,365,325	37,365,325
69	7	Tri Mekar Jaya	78,091,536	78,091,500	39,045,750	39,045,750
70	8	Tembelang	61,367,885	61,367,850	30,683,925	30,683,925
71	9	Negeri Jaya	79,867,978	79,867,950	39,933,975	39,933,975
2	10	Tanjung Sari	70,885,009	70,885,000	35,442,500	35,442,500
	X	**BELALAU**				
73	1	Kenali	76,736,181	76,736,150	38,368,075	38,368,075
74	2	Kejadian	54,066,905	54,066,900	27,033,450	27,033,450
75	3	Bumi Agung	68,681,548	68,681,500	34,340,750	34,340,750
76	4	Turgak	53,478,416	53,478,400	26,739,200	26,739,200
77	5	Bedudu	54,512,640	54,512,600	27,256,300	27,256,300
78	6	Sukarame	59,567,354	59,567,350	29,783,675	29,783,675
79	7	Hujung	70,852,236	70,852,200	35,426,100	35,426,100
80	8	Serungkuk	60,555,044	60,555,000	30,277,500	30,277,500
81	9	Suka Makmur	77,806,211	77,806,200	38,903,100	38,903,100
82	10	Pajar Agung	67,926,259	67,926,250	33,963,125	33,963,125
	XI	**BATU KETULIS**				
83	1	Bakhu	81,102,633	81,102,600	40,551,300	40,551,300
84	2	Luas	84,851,401	84,851,400	42,425,700	42,425,700
85	3	Argo Mulyo	77,082,712	77,082,700	38,541,350	38,541,350
86	4	Batu Kebayan	68,326,455	68,326,450	34,163,225	34,163,225
87	5	Atar Bawang	56,562,175	56,562,150	28,281,075	28,281,075

88	6	Campang Tiga	78,956,827	78,956,800	39,478,400	39,478,400
89	7	Way Ngison	64,791,183	64,791,150	32,395,575	32,395,575
90	8	Kubu Liku Jaya	57,792,076	57,792,050	28,896,025	28,896,025
91	9	Sumber Rejo	61,309,360	61,309,350	30,654,675	30,654,675
92	10	Atar Kuwau	66,015,142	66,015,100	33,007,550	33,007,550
	XII	**BATU BRAK**				
93	1	Negeri Ratu	55,326,383	55,326,350	27,663,175	27,663,175
94	2	Kembahang	75,592,567	75,592,550	37,796,275	37,796,275
95	3	Sukaraja	52,426,365	52,426,350	26,213,175	26,213,175
96	4	Gunung Sugih	55,947,885	55,947,850	27,973,925	27,973,925
97	5	Kegeringan	68,854,139	68,854,100	34,427,050	34,427,050
98	6	Canggu	56,534,090	56,534,050	28,267,025	28,267,025
99	7	Kota Besi	74,755,091	74,755,050	37,377,525	37,377,525
100	8	Sukabumi	65,983,422	65,983,400	32,991,700	32,991,700
101	9	Pekon Balak	59,092,761	59,092,750	29,546,375	29,546,375
102	10	Kerang	64,674,599	64,647,550	32,323,775	32,323,775
103	11	Teba Liokh	57,593,542	57,593,500	28,796,750	28,796,750
	XIII	**SUKAU**				
104	1	Tanjung Raya	84,357,491	84,357,450	42,178,725	42,178,725
105	2	Hanakau	70,917,154	70,917,150	35,458,575	35,458,575
106	3	Buay Nyerupa	81,229,963	81,229,950	40,614,975	40,614,975
107	4	Tapak Siring	74,215,653	74,215,650	37,107,825	37,107,825
108	5	Pagar Dewa	71,041,775	71,041,750	35,520,875	35,520,875
109	6	Jaga Raga	69,282,548	69,282,500	34,641,250	34,641,250
110	7	Suka Mulya	66,336,290	66,336,250	33,168,125	33,168,125
111	8	Bandar Baru	66,765,585	66,765,550	33,382,775	33,382,775
112	9	Bumi Jaya	64,262,210	64,262,200	32,131,100	32,131,100
113	10	Teba Pering Raya	67,319,768	67,319,750	33,659,875	33,659,875
	XIX	**LUMBOK SEMINUNG**				
114	1	Suka Banjar	67,912,209	67,912,200	33,956,100	33,956,100
115	2	Lombok	61,867,856	61,867,850	30,933,925	30,933,925
116	3	Heni Arong	62,216,701	62,216,700	31,108,350	31,108,350
117	4	Suka Banjar II UR	69,796,413	69,796,400	34,898,200	34,898,200
118	5	Lombok Timur	53,369,611	53,369,600	26,684,800	26,684,800
119	6	Tawan Suka Mulya	58,679,009	58,679,000	29,339,500	29,339,500
20	7	Ujung	50,537,612	50,537,600	25,268,800	25,268,800
121	8	Kagungan	50,617,535	50,617,500	25,308,750	25,308,750
122	9	Suka Maju	51,602,960	51,602,950	25,801,475	25,801,475
123	10	Lombok Selatan	53,159,218	53,159,200	26,579,600	26,579,600
124	11	Pancur Mas	59,546,982	59,546,950	29,773,475	29,773,475
	XV	**PESISIR TENGAH**				
125	1	Way Redak	60,591,067	60,591,050	30,295,525	30,295,525
126	2	Seray	61,654,914	61,654,900	30,827,450	30,827,450
127	3	Kampung Jawa	67,033,542	67,033,500	33,516,750	33,516,750
128	4	Rawas	62,292,262	62,292,250	31,146,125	31,146,125
129	5	Suka Negara	61,018,714	61,018,700	30,509,350	30,509,350
130	6	Pahmungan	62,287,280	62,287,250	31,143,625	31,143,625
131	***7***	Pasar Krui	Kelurahan			
132	***8***	Pasar Kota Krui	Kelurahan			
	XVI	**WAY KRUI**				
133	1	Pajar Bulan	50,594,012	50,594,000	25,297,000	25,297,000
134	2	Bumi Waras	50,711,157	50,711,150	25,355,575	25,355,575
135	3	Penggawa Lima Ilir	52,875,524	52,875,500	26,437,750	26,437,750

136	4	Banjar Agung	50,988,001	50,988,000	25,494,000	25,494,000
137	5	Ulu Krui	59,613,857	59,613,850	29,806,925	29,806,925
138	6	Gunung Kemala	56,763,823	56,763,800	28,381,900	28,381,900
139	7	Suka Baru	57,121,676	57,121,650	28,560,825	28,560,825
140	8	Labuhan Mandi	59,938,517	59,938,500	29,969,250	29,969,250
141	9	Gunung Kemala Timur	56,458,265	56,458,250	28,229,125	28,229,125
142	10	Penggawa Lima	51,451,915	51,451,900	25,725,950	25,725,950
	XVII	**KRUI SELATAN**				
143	1	Balai Kencana	65,879,349	65,879,300	32,939,650	32,939,650
144	2	Way Suluh	57,346,317	57,346,300	28,673,150	28,673,150
145	3	Way Napal	58,365,796	58,365,750	29,182,875	29,182,875
146	4	Padang Haluan	61,178,116	61,178,100	30,589,050	30,589,050
147	5	Lintik	57,725,620	57,725,600	28,862,800	28,862,800
148	6	Walur	54,590,293	54,590,250	27,295,125	27,295,125
149	7	Pemerihan	54,747,757	54,747,750	27,373,875	27,373,875
150	8	Mandiri Sejati	50,402,309	50,402,300	25,201,150	25,201,150
151	9	Padang Raya	55,159,881	55,159,850	27,579,925	27,579,925
152	10	Sukajadi	52,773,856	52,773,850	26,386,925	26,386,925
	XVIII	**PESISIR SELATAN**				
153	1	NR Tenumbang	65,998,814	65,998,800	32,999,400	32,999,400
154	2	Sukarame	62,020,971	62,020,950	31,010,475	31,010,475
155	3	Pelita Jaya	61,198,560	61,198,550	30,599,275	30,599,275
156	4	Sumur Jaya	64,830,884	64,830,850	32,415,425	32,415,425
157	5	Tanjung Jati	52,657,419	52,657,400	26,328,700	26,328,700
158	6	Pagar Dalam	61,635,668	61,635,650	30,817,825	30,817,825
159	7	Tanjung Setia	67,389,696	67,389,650	33,694,825	33,694,825
160	8	Biha	75,721,432	75,721,400	37,860,700	37,860,700
161	9	Way Jambu	68,490,807	68,490,800	34,245,400	34,245,400
162	10	Marang	116,756,138	116,756,100	58,378,050	58,378,050
163	11	Tanjung Raya	66,089,472	66,089,450	33,044,725	33,044,725
164	12	Bangun Negara	75,613,622	75,613,600	37,806,800	37,806,800
165	13	Ulok Manik	61,681,394	61,681,650	30,840,825	30,840,825
166	14	Paku Negara	66,718,037	66,718,000	33,359,000	33,359,000
167	15	Tulung Bamban	62,288,183	62,288,150	31,144,075	31,144,075
	XIX	**PESISIR UTARA**				
168	1	Walur	58,011,099	58,011,050	29,005,525	29,005,525
169	2	Padang Rindu	58,608,782	58,608,750	29,304,375	29,304,375
170	3	Kuripan	61,893,766	61,893,750	30,946,875	30,946,875
171	4	Negeri Ratu	55,745,299	55,745,250	27,872,625	27,872,625
172	5	Kerbang Langgar	57,578,233	57,578,200	28,789,100	28,789,100
173	6	Kerbang Dalam	56,505,622	56,505,600	28,252,800	28,252,800
174	7	Balam	56,294,234	56,294,200	28,147,100	28,147,100
175	8	Way Narta	51,769,664	51,769,650	25,884,825	25,884,825
176	9	Kota Karang	54,504,145	54,504,100	27,252,050	27,252,050
177	10	Batu Raja	56,806,759	56,806,750	28,403,375	28,403,375
178	11	Pemancar	56,921,624	56,921,600	28,460,800	28,460,800
179	12	Gedau	60,298,478	60,298,450	30,149,225	30,149,225
	XX	**PULAU PISANG**				
180	1	Pasar Pulau Pisang	61,155,165	61,155,150	30,577,575	30,577,575
181	2	Labuhan	59,076,370	59,076,350	29,538,175	29,538,175
182	3	Sukadana	58,124,953	58,124,950	29,062,475	29,062,475
183	4	Sukamarga	56,984,356	56,984,350	28,492,175	28,492,175
184	5	Pekon Lok	56,306,390	56,306,350	28,153,175	28,153,175
185	6	Bandar Dalam	57,216,718	57,216,700	28,608,350	28,608,350

	XX	**LEMONG**				
186	1	Pagar Dalam	68,489,524	68,489,500	34,244,750	34,244,750
187	2	Bambang	63,067,066	63,067,050	31,533,525	31,533,525
188	3	Tanjung Jati	61,738,223	61,738,200	30,869,100	30,869,100
189	4	Way Batang	67,573,706	67,573,700	33,786,850	33,786,850
190	5	Rata Agung	81,179,293	81,179,250	40,589,625	40,589,625
191	6	Lemong	80,185,673	80,185,650	40,092,825	40,092,825
192	7	Penengahan	76,070,249	76,070,200	38,035,100	38,035,100
193	8	Malaya	78,059,637	78,059,600	39,029,800	39,029,800
194	9	Cahaya Negeri	65,401,755	65,401,750	32,700,875	32,700,875
195	10	Bandar Pugung	74,983,641	74,983,600	37,491,800	37,491,800
196	11	Tanjung Sakti	57,865,226	57,865,200	28,932,600	28,932,600
197	12	Suka Mulya	67,510,599	67,510,550	33,755,275	33,755,275
198	13	Parda Haga	63,099,880	63,099,850	31,549,925	31,549,925
	XXI	**KARYA PENGGAWA**				
199	1	Menyancang	60,300,534	60,300,500	30,150,250	30,150,250
200	2	Penggawa V Tengah	55,185,650	55,185,650	27,592,825	27,592,825
201	3	La'ay	57,723,896	57,723,850	28,861,925	28,861,925
202	4	Penggawa V Ulu	63,061,439	63,061,400	31,530,700	31,530,700
203	5	Penengahan	67,754,125	67,754,100	33,877,050	33,877,050
04	6	Kebuayan	56,644,099	56,644,050	28,322,025	28,322,025
205	7	Way Nukak	62,087,942	62,087,900	31,043,950	31,043,950
206	8	Way Sindi	67,815,945	67,815,900	33,907,950	33,907,950
207	9	Way Sindi Utara	57,687,716	57,687,700	28,843,850	28,843,850
208	10	Tembakak Way Sindi	61,528,236	61,528,200	30,764,100	30,764,100
209	11	Way Sindi Hanuan	70,683,267	70,683,250	35,341,625	35,341,625
210	12	Asahan Way Sindi	62,702,040	62,702,000	31,351,000	31,351,000
	XXII	**BALIK BUKIT**				
211	1	Bahway	86,740,221	86,740,200	43,370,100	43,370,100
212	2	Padang Dalom	64,339,053	64,339,050	32,169,525	32,169,525
213	3	Sukarame	82,214,590	82,214,550	41,107,275	41,107,275
214	4	Sebarus	75,605,098	75,605,050	37,802,525	37,802,525
215	5	Watas	70,407,425	70,407,400	35,203,700	35,203,700
216	6	Way Empulau Ulu	70,309,157	70,309,150	35,154,575	35,154,575
217	7	Gunung Sugih	71,004,850	71,004,850	35,502,425	35,502,425
8	***8***	Pasar Liwa	Kelurahan			
219	9	Kubu Perahu	67,733,410	67,733,400	33,866,700	33,866,700
220	10	Padang Cahya	102,507,304	102,507,300	51,253,650	51,253,650
221	***11***	Way Mengaku	Kelurahan			
222	12	Sedampah Indah	70,647,508	70,647,500	35,323,750	35,323,750
	XXIII	**BENGKUNAT**				
223	1	Parda Suka	59,536,513	59,536,500	29,768,250	29,768,250
224	2	Negeri Ratu Ngaras	57,443,942	57,443,900	28,721,950	28,721,950
225	3	Kota Batu	60,155,524	60,155,500	30,077,750	30,077,750
226	4	Mulang Maya	66,395,015	66,395,000	33,197,500	33,197,500
227	5	Raja Basa	62,945,966	62,945,950	31,472,975	31,472,975
228	6	Padang Dalam	60,314,946	60,314,900	30,157,450	30,157,450
229	7	Suka Maju	63,893,998	63,893,950	31,946,975	31,946,975
230	8	Sukarame	60,461,588	60,461,550	30,230,775	30,230,775
231	9	Bandar Jaya	57,803,541	57,803,500	28,901,750	28,901,750
	XXIV	**NGAMBUR**				
232	1	Sumber Agung	90,216,671	90,216,650	45,108,325	45,108,325
233	2	Ulok Mukti	80,638,583	80,638,550	40,319,275	40,319,275
234	3	Negeri Ratu Ngambur	87,502,467	87,502,450	43,751,225	43,751,225

235	4	Pekon Mon	85,102,426	85,102,400	42,551,200	42,551,200
236	5	Gedung Cahaya Kuninga	80,813,018	80,813,000	40,406,500	40,406,500
237	6	Suka Banjar	88,215,905	88,215,900	44,107,950	44,107,950
238	7	Suka Negara	70,526,260	70,526,250	35,263,125	35,263,125
239	8	Muara Tembulih	62,327,941	62,327,900	31,163,950	31,163,950
240	9	Bumi Ratu	82,412,919	82,412,900	41,206,450	41,206,450
	XXV	**BENGKUNAT BELIMBING**				
241	1	Pagar Bukit	131,687,549	131,687,500	65,843,750	65,843,750
242	2	Tanjung Kemala	75,083,502	75,083,500	37,541,750	37,541,750
243	3	Suka Marga	85,197,013	85,197,000	42,598,500	42,598,500
244	4	Kota Jawa	87,134,463	87,134,450	43,567,225	43,567,225
245	5	Penyandingan	71,266,390	71,266,350	35,633,175	35,633,175
246	6	Bandar Dalam	87,608,309	87,608,300	43,804,150	43,804,150
247	7	Way Haru	85,653,927	85,653,900	42,826,950	42,826,950
248	8	Pemerihan	79,832,431	79,832,400	39,916,200	39,916,200
249	9	Suka Negeri	71,943,852	71,943,850	35,971,925	35,971,925
250	10	Sumberejo	71,135,380	71,135,350	35,567,675	35,567,675
251	11	Siring Gading	77,322,589	77,322,550	38,661,275	38,661,275
252	12	Way Tias	81,783,740	81,783,700	40,891,850	40,891,850
253	13	Tanjung Rejo	67,224,851	67,224,850	33,612,425	33,612,425
54	14	Pagar Bukit Induk	71,745,427	71,745,400	35,872,700	35,872,700
JUMLAH			**16,901,627,300**	**16,901,595,100**	**8,450,797,550**	**8,450,797,550**
Saldo Kas Pada Daerah :			32,200			

Keterangan :

1. Saldo Formulasi Perhitungan : Rp. 0
2. Saldo Pembulatan ke Bawah : Rp. 32.200 +
3. **Saldo Pada Kas Daerah : Rp. 32,200**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

CONTOH LAMPIRAN
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

LAMPIRAN : II.1.

BERITA ACARA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) PEKON .....
Nomor : ...../...../LHP/2013
TENTANG :
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
.....

Pada hari ini ....., tanggal .....2013, bertempat di Kantor/Balai Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Barat, telah diadakan Rapat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon ....., dengan dihadiri oleh Ketua, para Anggota LHP serta Peratin, Perangkat Pekon dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
   a. Anggaran Pendapatan Pekon Rp.....
   b. Anggaran Belanja Pekon
      - Belanja Tidak LangsungRp. .....
      - Belanja Langsung Rp. .....+

      Rp.....--

      Surplus / Defisit *(tulis salah satu)* **Rp.....**

   c. Anggaran Pembiayaan
      - Penerimaan Pembiayaan Rp. .....
      - Pengeluaran Pembiayaan Rp. ..... _

      Jumlah Pembiayaan **Rp. .....**

2. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dengan Peraturan Pekon.

Demikian Berita Acara Rapat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...2013

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) PEKON .....

WAKIL KETUA, **KETUA,**

....

LAMPIRAN : II.1.1.

DAFTAR HADIR LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)

RAPAT : Tentang Rancangan APB Pekon ..... Tahun 2013
PEKON : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : 2013
PUKUL : .....
TEMPAT : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....
8.			8. .....
9.			9. .....
10.			10.....
11.			11. .....
12.			12. .....
13.	Dst		13. .....

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : ..... Orang
2. Hadir : ..... Orang
3. Tidak Hadir : ..... Orang

....., ... 2013

KETUA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN,

.....

LAMPIRAN : II.1.2.

DAFTAR HADIR PERANGKAT PEKON DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : *Tentang Rancangan APB Pekon ..... Tahun 2013*
PEKON : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : 2013
PUKUL : .....
TEMPAT : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....
8.			8. .....
9.			9. .....
10.			10.....
11.			11. .....
12.			12. .....
13.	Dst		13. .....

KETERANGAN :

1. Jumlah Perangkat Pekon : ..... Orang
2. Hadir : ..... Orang
3. Tidak Hadir : ..... Orang

....., ...2013

PERATIN .....,

.....

LAMPIRAN : II.2.

PIMPINAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) PEKON .....
KECAMATAN..... KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) PEKON .....
NOMOR : ...../...../LHP/2013

TENTANG

PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON .....
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) PEKON .....

Membaca : Surat Peratin ..... Nomor : ...../...../...../2013 Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2013;

Menimbang :
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan Peratin;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lembaga Himpun Pemekonan perlu menetapkan Keputusan Lembaga Himpun Pemekonan tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Mendengar : Musyawarah dan pemufakatan para anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon ....., dalam rapatnya pada tanggal .....(*tulis tanggalnya*) .....(*tulis bulannya*) Tahun 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Pekon Rp. .....

b. Anggaran Belanja Pekon
   - Belanja Tidak Langsung Rp. .....
   - Belanja Langsung Rp. .....+

   Rp. .....--

Surplus / Defisit *(tulis salah satu)* **Rp. .....**

c. Anggaran Pembiayaan
   - Penerimaan Pembiayaan Rp. .....
   - Pengeluaran Pembiayaan Rp. ..... _

Jumlah Pembiayaan **Rp. .....**

KEDUA : Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana diktum kesatu Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 dengan *Peraturan Pekon*;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal ...(tulis tanggal) ...(tulis bulan) 2013

KETUA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Peratin .....;
2. Arsip.

LAMPIRAN : II.2.1.

BERITA ACARA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) PEKON .....
Nomor : ...../...../LHP/2013
TENTANG :
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
.....

Pada hari ini ....., tanggal .....2013, bertempat di Kantor/Balai Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Barat, telah diadakan Rapat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon ....., dengan dihadiri oleh Ketua, para Anggota LHP serta Peratin, Perangkat Pekon dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
   d. Anggaran Pendapatan Pekon Rp.....,-
   e. Anggaran Belanja Pekon
      - Belanja Tidak LangsungRp. .....
      - Belanja Langsung Rp. .....+

      Rp. .....--

      Surplus / Defisit *(tulis salah satu)* **Rp. .....,-**

   f. Anggaran Pembiayaan
      - Penerimaan Pembiayaan Rp. .....
      - Pengeluaran Pembiayaan Rp. ..... _

      Jumlah Pembiayaan **Rp. .....,-**
2. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dengan Peraturan Pekon.

Demikian Berita Acara Rapat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...2013

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP) PEKON .....

WAKIL KETUA, **KETUA,**

....

LAMPIRAN : II.2.2.

DAFTAR HADIR LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)

RAPAT : Tentang Rancangan APB Pekon ..... Tahun 2013
PEKON : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : 2013
PUKUL : .....
TEMPAT : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....
8.			8. .....
9.			9. .....
10.			10.....
11.			11. .....
12.			12. .....
13.	Dst		13. .....

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : ..... Orang
2. Hadir : ..... Orang
3. Tidak Hadir : ..... Orang

....., ...
2013

KETUA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN,

.....

LAMPIRAN : II.2.3.

DAFTAR HADIR PERANGKAT PEKON DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : *Tentang Rancangan APB Pekon ..... Tahun 2013*
PEKON : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : 2013
PUKUL : .....
TEMPAT : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....
8.			8. .....
9.			9. .....
10.			10.....
11.			11. .....
12.			12. .....
13.	Dst		13. .....

KETERANGAN :

1. Jumlah Perangkat Pekon : ..... Orang
2. Hadir : ..... Orang
3. Tidak Hadir : ..... Orang

....., ...
2013

PERATIN .....,

.....

LAMPIRAN : II.3.

PERATURAN PEKON .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR ..... TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON .....
TAHUN ANGGARAN 2013

PERATIN .....

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Pekon;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pekon ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON
DAN
PERATIN .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN PEKON ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON ..... TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ..... Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Pekon Rp. .....,-
2. Anggaran Belanja Pekon
   Belanja Tidak Langsung Rp. .....
   Belanja Langsung Rp. .....+
   Rp. .....--

   Surplus / Defisit *(tulis salah satu)* **Rp. .....,-**

3. Anggaran Pembiayaan
   a. Penerimaan Pembiayaan Rp. .....
   b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ..... _

   Jumlah Pembiayaan **Rp. .....,-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon..... sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Pekon ini yang terdiri dari :

Lampiran I : Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;

Pasal 3

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Peratin dapat menetapkan Peraturan Peratin dan/atau Keputusan Peratin guna Pelaksanaan Peraturan Pekon ini.

Pasal 5

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan Berita Daerah.

Ditetapkan di .....
pada tanggal ...(tulis tanggal) ...(tulis bulan) 2013

PERATIN ..... ,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon .....
2. Arsip

LAMPIRAN : II.3.1.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
PEKON.....KECAMATAN.....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN**			
1. 1.	**Pendapatan Asli Pekon**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 1. 1.	Hasil Usaha Pekon	Rp.	Rp.	
1. 1. 1. 1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 1. 2.	**Hasil Pengelolaan Keuangan Pekon**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 1. 2. 1.	Tanah Kas Pekon	Rp.	Rp.	
1. 1. 2. 2.	Pasar Pekon	Rp.	Rp.	
1. 1. 2. 3.	Pasar Hewan	Rp.	Rp.	
1. 1. 2. 4.	Tambatan Perahu	Rp.	Rp.	
1. 1. 2. 5.	Bangunan Pekon	Rp.	Rp.	
1. 1. 2. 6.	Pelelangan Ikan yang Dikelola Pekon	Rp.	Rp.	
1. 1. 2. 7.	Lain-lain Kekayaan Milik Pekon	Rp.	Rp.	
1. 1. 3.	**Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 1. 3. 1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 1. 4.	**Hasil Gotong Royong Masyarakat**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 1. 4. 1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 1. 5.	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 1. 5. 1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 2.	**Dana Perimbangan**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	Rp.	Rp.	
1. 2. 1.1.	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.	Rp.	
1. 2. 2.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 2. 2.	**Bagi Hasil Retribusi Daerah**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 2. 2.1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 2. 3.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp.	Rp.	
1. 2. 3.1.	Alokasi Dana Pekon (ADP)	Rp.	Rp.	
1. 2. 3.2.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 3.	**Bantuan Keuangan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Desa Lainnya**	Rp.	Rp.	
1. 3. 1.	**Bantuan Keuangan Pemerintah**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 3. 1.1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 3. 2.	**Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 3. 2.1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 3. 3.	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	**Rp.**	**Rp.**	
1. 3. 3.1.	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon	Rp.	Rp.	
1. 3. 3.2.	dst.....	Rp.	Rp.	

1. 3.4.	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	Rp.	Rp.	
1. 3.4. 1.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 4.	**Hibah**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 4.1.	Hibah dari Pemerintah	Rp.	Rp.	
1. 4.2.	Hibah dari Pemerintah Provinsi	Rp.	Rp.	
1. 4.3.	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	Rp.	
1. 4.4.	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	Rp.	Rp.	
1. 4.5.	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan			
1. 4.6.	dst.....	Rp.	Rp.	
1. 5.	**Sumbangan dari Pihak Ketiga**	**Rp.**	**Rp.**	
1. 5. 1.	Sumbangan dari	Rp.	Rp.	
1. 5. 2.	dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	**BELANJA PEKON**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.	Belanja Langsung	Rp.	Rp.	
2. 1. 1.	**Belanja Pegawai/Honorarium**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1. 1.1.	Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP)	Rp.	Rp.	
2. 1. 1.2.	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1. 2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.2.1.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp.	Rp.	
2. 1.2.1.2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Rp.	Rp.	
2. 1.2.1.3	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp.	Rp.	
2. 1.2.1.4	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1.2.2.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.2.2.1	Belanja Jasa Servis Dinas Milik Pekon	Rp.	Rp.	
2. 1.2.2.2	Belanja Pergantian Suku Cadang	Rp.	Rp.	
2. 1.2.2.3	Belanja Bahan Bakar Minyak Motor Dinas	Rp.	Rp.	
2. 1.2.2.4	Belanja Perawatan Kenadaraan Bermotor	Rp.	Rp.	
2. 1.2.2.5	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1.2.3.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.2.3.1	Belanja Cetak	Rp.	Rp.	
2. 1.2.3.2	Belanja Penggandaan / Foto Kopi	Rp.	Rp.	
2. 1.2.3.3	Belanja Dokumentasi	Rp.	Rp.	
2. 1.2.4.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.2.4.1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	Rp.	
2. 1.2.4.2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp.	Rp.	
2. 1.2.5.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.2.5.1	Bantuan Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	Rp.	

2. 1.3.	**Belanja Modal**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.3.1	Belanja Modal Tanah	Rp.	Rp.	
2. 1.3.1.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp.	Rp.	
2. 1.3.1.2	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1.3.2.	**Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.3.2.1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	Rp.	Rp.	
2. 1.3.2.2	Belanja Modal Pengadaan Mesin *Hitung*	Rp.	Rp.	
2. 1.3.3.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan Almari	Rp.	Rp.	
2. 1.3.3.2	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	Rp.	Rp.	
2. 1.3.3.3	Belanja Modal Pengadaan White Board	Rp.	Rp.	
2. 1.3.3.4	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	Rp.	Rp.	
2. 1.3.3.5	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1.3.4.	**Belanja Modal Pengadaan Komputer**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.3.4.1	Belanja Modal Pengadaan Printer	Rp.	Rp.	
2. 1.3.4.2	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Key Board, Hard Disk)	Rp.	Rp.	
2. 1.3.4.3	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1.3.5.	**Belanja Modal Pengadaan Meubeler**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.3.5.1	Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Rapat	Rp.	Rp.	
2. 1.3.5.3	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1.3.6.	**Belanja Modal Buku/Perpustakaan**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.3.6.1	Belanja Modal Buku Bacaan	Rp.	Rp.	
2. 1.3.6.3	dst.....	Rp.	Rp.	
2. 1.4.	**Belanja Pembangunan**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.4.1.	**Belanja Pembangunan Fisik**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.4.1.1	Belanja Perbaikan Sarana Publik Skala Kecil	Rp.	Rp.	
2. 1.4.1.2	Belanja Perbaikan Lingkungan dan Permukiman	Rp.	Rp.	
2. 1.4.1.3	Belanja Peningkatan Infrastruktur Pekon dan Sarana Umum	Rp.	Rp.	
2. 1.4.1.	**Belanja Pembangunan Non Fisik**	**Rp.**	**Rp.**	
2. 1.4.1.1	Belanja Pengembangan/ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat (Diklat)	Rp.	Rp.	
2.2	**Belanja Tidak Langsung**	**Rp.**	**Rp.**	
2.2.1.	**Belanja Pegawai**	**Rp.**	**Rp.**	
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon	Rp.	Rp.	
2.2.1.2.	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon (TPAPP)	Rp.	Rp.	
2.2.1.3.	Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan	Rp.	Rp.	
2.2.1.4.	Operasional LHP Selama 1 Tahun	Rp.	Rp.	
2.2.1.5.	Tunjangan Bendahara Pekon	Rp.	Rp.	

2.2.2.	**Belanja Hibah**	**Rp.**	**Rp.**	
2.2.2.1	dst.....	Rp.	Rp.	
2.2.3.	**Belanja Bantuan Sosial**	**Rp.**	**Rp.**	
2.2.3.1.	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	Rp.	
2.2.3.2.	Bantuan Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan/Nasional	Rp.	Rp.	
2.2.4.	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan :**	**Rp.**	**Rp.**	
2.2.4.1	Bantuan Keuangan kepada PKK	Rp.	Rp.	
2.2.4.2.	Bantuan Keuangan kepada LPMP	Rp.	Rp.	
2.2.4.3.	Bantuan Keuangan kepada Posyandu dan Kader	Rp.	Rp.	
2.2.4.4.	Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna	Rp.	Rp.	
2.2.4.5.	Bantuan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu	Rp.	Rp.	
2.2.4.6.	Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Peratin	Rp.	Rp.	
2.2.4.7.	Bantuan Pelaksanaan Pelantikan Peratin	Rp.	Rp.	
2.2.4.8.	Bantuan Pelaksanaan Lomba Pekon	Rp.	Rp.	
2.2.4.9.	Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan	Rp.	Rp.	
2.2.4.10.	Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Adat, Kesenian dan Lokal	Rp.	Rp.	
2.2.5.	**Belanja Tak Terduga :**	**Rp.**	**Rp.**	
2.2.5.1	Belanja Keadaan Darurat	Rp.	Rp.	
2.2.5.2.	Belanja Bencana Alam	Rp.	Rp.	
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**Rp.**	**Rp.**	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	Rp.	Rp.	
3.1.2.	Pencairan dari Dana Cadangan	Rp.	Rp.	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon yang Dipisahkan	Rp.	Rp.	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman	Rp.	Rp.	
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**Rp.**	**Rp.**	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	Rp.	
3.2.2.	Penyertaan Modal Pekon	Rp.	Rp.	
3.2.3.	Pembayaran Utang Jatuh Tempo	Rp.	Rp.	
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp.	Rp.	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**Rp.**	**Rp.**	

.....,.....2013

Peratin.....,

.....

LAMPIRAN : II.4.

KOP PEKON

KEPUTUSAN PERATIN ....
KECAMATAN . . . .
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : . . . . . /2013

TENTANG

TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON DAN BENDAHARA APBP TAHUN ANGGARAN 2013

PERATIN .....,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagai sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) . . . . . sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, agar pencapaian tujuan dapat efektif dan efesien dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) Pekon . . .. .Kecamatan . . . . . Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 *Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik* Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indodnesia Tahun 2000 Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/HJ tanggal 6 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan Bendahara Pekon . . . . Kecamatan. . . . . Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2013 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Peratin yag karena jabatannya Mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.

b. Bendahara adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin Menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan dan mempertangungjawabkan keuangan pekon dalam rangka pelaksanaan APBP

c. Juru tulis Pekon mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pegelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBP);
- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Pekon;
- Menyusun Raperdes APBP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBP;
- Menyusun Rancangan Peratin tentang pelaksanaan peraturan Pekon tentang APBP dan Perubahan APBP;
- Menguji tagihan (sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari TPTPKP);

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Peratin;

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBP;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai pada saat ditetapkan dan hanya berlaku untuk tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal 2013

PERATIN

....,

. . . . . .

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Barat
   Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
2. Camat .....
3. Himpunan Surat Keputusan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATIN .....
NOMOR : .....
TANGGAL : .....

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TPTPKP) DAN BENDAHARA PEKON .....
TAHUN ANGGARAN 2013

I. SUSUNAN TPTPKP

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Peratin	Penanggungjawab	
2	Juru Tulis	Koordinator	
3	Kepala Urusan Umum	Anggota	
4	Kepala Urusan Pemerintahan	Anggota	
5	Kepala Urusan Pembangunan	Anggota	

II. BENDAHARA PEKON

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	.....	Bendahara Pekon	

PERATIN. . . . . .,

. . . . . .

LAMPIRAN : II.5.1.

DAFTAR HADIR

RAPAT : Tentang Penyusunan DRK ADP Tahun Anggaran 2013
PEKON : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : 2013
PUKUL : .....
TEMPAT : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....
8.			8. .....
9.			9. .....
10.			10.....
11.			11. .....
12.			12. .....
13.	Dst		13. .....

KETERANGAN :

1. Jumlah Undangan : ..... Orang
2. Hadir : ..... Orang
3. Tidak Hadir : ..... Orang

....., ...2013

PERATIN .....,

.....

LAMPIRAN : II.5.

BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PEKON .....
TAHUN ANGGARAN 2013

Pekon :
Kecamatan :
Kabupaten : Lampung Barat
Provinsi : Lampung

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun 2013
tempat .....
Dengan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini bahwa :

1. Peratin sebagai penanggung jawab Alokasi Dana Pekon ....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Bendahara sebagai pengelola kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**
3. **PIHAK PERTAMA** mensahkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2013 yang disusun **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan;
4. **PIHAK KEDUA** menerima Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2013;
5. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) telah sesuai dengan pedoman yang disahkan;
6. Daftar hadir acara penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2013, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Bendahara	Peratin .....
Sebagai Pengelola Kegiatan,	Sebagai Penanggung Jawab,
.....	.....

SAKSI – SAKSI

1. Ketua LHP (.....)
2. Ketua LPMP (.....)
3. Ketua TP.PKK (.....)
4. Tokoh Masyarakat (.....)

LAMPIRAN : II.5.2.

1. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON .....
KECAMATAN..... KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

Alokasi Dana Pekon (ADP) sebesar **Rp. .....** (***uraikan bilangan angka dengan huruf*** .....)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME - Orang/kali - Unit - Buah - dll	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.) (klm 3x4)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN (Rp.)	SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
	Jumlah					

Mengetahui
Ketua LHP,

Peratin .....,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : II.6.

BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
50 % TAHAP I (KESATU)
ALOKASI DANA PEKON (ADP) TAHUN ANGGARAN 2013

Pekon :
Kecamatan :
Kabupaten : Lampung Barat
Propinsi : Lampung

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun 2013
tempat .....
Dengan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini bahwa :

1. Peratin sebagai penanggung jawab Alokasi Dana Pekon ....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Bendahara sebagai pengelola kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**
3. **PIHAK PERTAMA** mensahkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon **50 % TAHAP I (KESATU)** Tahun Anggaran 2013 yang disusun **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan;
4. **PIHAK KEDUA** menerima Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon **50 % TAHAP I (KESATU)** Tahun Anggaran 2013;
5. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon **50 % TAHAP I (KESATU)** Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan pedoman yang disahkan;
6. Daftar hadir acara penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon **50 % TAHAP I (KESATU)** Tahun Anggaran 2013, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Bendahara	Peratin .....
Sebagai Pengelola Kegiatan,	Sebagai Penanggung Jawab,
.....	.....

SAKSI – SAKSI :

1. Ketua LHP (.....)
2. Ketua LPMP (.....)
3. Ketua TP.PKK (.....)
4. Tokoh Masyarakat (.....)

LAMPIRAN : II.6.1.

DAFTAR HADIR

RAPAT : Tentang Penyusunan DRK ADP 50% Tahap I (Kesatu) Tahun Anggaran 2013
PEKON : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : 2013
PUKUL : .....
TEMPAT : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....
8.			8. .....
9.			9. .....
10.			10.....
11.			11. .....
12.			12. .....
13.	Dst		13. .....

KETERANGAN :

1. Jumlah Undangan : ..... Orang
2. Hadir : ..... Orang
3. Tidak Hadir : ..... Orang

....., ...2013

PERATIN .....,

.....

LAMPIRAN : II.6.2.

I. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) 50 % TAHAP I (KESATU)

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) 50 % TAHAP I (KESATU)
PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON .....
KECAMATAN..... KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

Alokasi Dana Pekon (ADP) sebesar **Rp. .....** (***uraikan bilangan angka dengan huruf*** .....)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME - Orang/kali - Unit - Buah - dll	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.) (klm 3x4)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN SWADAYA (Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
	Jumlah					

Mengetahui
Ketua LHP,

Peratin .....,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : II.7.

BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
50 % TAHAP II (KEDUA)
ALOKASI DANA PEKON (ADP) TAHUN ANGGARAN 2013

Pekon :
Kecamatan :
Kabupaten : Lampung Barat
Propinsi : Lampung

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun 2013
tempat .....
Dengan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini bahwa :

1. Peratin sebagai penanggung jawab Alokasi Dana Pekon ....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Bendahara sebagai pengelola kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**
3. **PIHAK PERTAMA** mensahkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon **50 % TAHAP II (KEDUA)** Tahun Anggaran 2013 yang disusun **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan;
4. **PIHAK KEDUA** menerima Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon **50 % TAHAP II (KEDUA)** Tahun Anggaran 2013;
5. *Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon* **50 % TAHAP II (KEDUA)** Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan pedoman yang disahkan;
6. Daftar hadir acara penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon **50 % TAHAP II (KEDUA)** Tahun Anggaran 2013, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Bendahara	Peratin .....
Sebagai Pengelola Kegiatan,	Sebagai Penanggung Jawab,
.....	.....

SAKSI – SAKSI

1. Ketua LHP (.....)
2. Ketua LPMP (.....)
3. Ketua TP.PKK (.....)
4. Tokoh Masyarakat (.....)

LAMPIRAN : II.7.1.

DAFTAR HADIR

RAPAT : Tentang Penyusunan DRK ADP 50% Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2013
PEKON : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : 2013
PUKUL : .....
TEMPAT : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....
8.			8. .....
9.			9. .....
10.			10.....
11.			11. .....
12.			12. .....
13.	Dst		13. .....

KETERANGAN :

1. Jumlah Undangan : ..... Orang
2. Hadir : ..... Orang
3. Tidak Hadir : ..... Orang

....., ... 2013

PERATIN .....,

.....

LAMPIRAN : II.7.2.

II. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) 50 % TAHAP II (KEDUA)

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) 50 % TAHAP II (KEDUA)
PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON .....
KECAMATAN..... KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

Alokasi Dana Pekon (ADP) sebesar **Rp. .....** (***uraikan bilangan angka dengan huruf*** .....)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME - Orang/kali - Unit - Buah - dll	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.) (klm 3x4)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN (Rp.)	SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
	Jumlah					

Mengetahui
Ketua LHP,

Peratin .....,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : II.8.

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)
PEKON . .. . .KECAMATAN . . . . . .
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BERITA ACARA
RAPAT LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON DAN APARAT PEKON
DENGAN ACARA PENETAPAN BESARAN HONOR LHP
TANGGAL 2013

Pada hari ini . . . . . .tanggal . . . . . .bulan . . . . . .Tahun Dua Ribu Sembilan, Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan Aparat Pekon . . . . .telah mengadakan rapat tentang penetapan besaran tunjangan LHP Pekon. . . . . Tahun Anggaran 2013 dengan perincian sebagai berikut :

Ketua 1 X 12 bulan :Rp. . . . . .

Wakil Ketua 1 X 12 bln Rp. . . . . .

Sekretaris 1 X 12 bln Rp. . . . . .

Anggota X 12 bln Rp. . . . . .

Anggota X 12 bln Rp. . . . . .

Dst . . . .

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai pedoman pembayaran honorarium LHP Pekon.....Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Barat.

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

....

Ketua, Sekretaris,

(. . . . . .) (. . . . . .)

Mengetahui/menyetujui
Peratin. . . . . .

. . . . . .

LAMPIRAN : II.8.1.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN LHP

NO	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN	
01			1.....	
02				2.....
03			3.....	
04				4.....
05			5.....	
06				6.....
07			7.....	
08				8.....
09			9.....	
10				10.....
11			11.....	
12				12.....
13			13.....	
14				14.....
15			15.....	
16				16.....
17			17.....	
18				18.....
19			19.....	
20				20.....
21			21.....	
22				22.....
23			23.....	
24				24.....
25			25.....	
26				26.....
27			27.....	
28				28.....
29			29.....	
30	Dst			30.....

LAMPIRAN : II.10.

KOP PEKON

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : .....
Jabatan : Peratin.....
Pekon : .....
Alamat : .....

Bertindak selaku Penerima Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp..... (terbilang.....) yang digunakan untuk Alokasi Dana Pekon.

Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia menyerahkan pertanggungjawaban / SPJ penggunaan Dana Tahap I (kesatu) kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat **paling lambat sampai dengan pengusulan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap II (kedua)** (*pernyataan untuk pencairan ADP Tahap I*) / **paling lambat Minggu Kedua Bulan Desember** (*pernyataan untuk pencairan ADP Tahap II*) Tahun Anggaran 2013.

Bantuan tersebut diterima melalui Rekening Pekon ..... Dengan Nomor Rekening : ..... (Bank Lampung Cabang.....).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, ...2013
Yang Membuat Pernyataan
Peratin .....,

Meterai
6000

.....

LAMPIRAN : II.11.

SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON

SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA PEKON .....
KECAMATAN .....KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyatakan hal-hal sebagai berikut.

I. Menyetujui pencairan Alokasi Dana Pekon yang dilaksanakan oleh Pekon.....Kecamatan..... .....sebesar Rp. ..... (..... .....)

II Penarikan/pencairan Alokasi Dana Pekon dimaksud dilakukan secara bertahap yaitu penarikan/pencairan tahap **kesatu/kedua** sebesar Rp..... (.....) dari dana yang disetujui atas masing-masing jenis kegiatan setelah surat persetujuan ini ditandatangani.

III. Penarikan/pencairan tahap selanjutnya dilakukan dengan ketentuan apabila hasil penggunaan dana yang ditarik / dicairkan pada tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan telah diverifikasi/diteliti oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan masing-masing.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Pekon
Kabupaten Lampung Barat,

.....
NIP. .....

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PPKAD;
3. Camat .....

LAMPIRAN : II.12.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

C.5

SKPD :
TAHUN ANGGARAN :

Lembar Ke : I/II/III/IV/V/VI
NO. : A.2

SURAT BUKTI PENGELUARAN

Sudah Terima dari .....
Uang Sejumlah Rp. .....
(.....)
Yaitu untuk Pembayaran .....
.....
.....
.....
.....
Berguna buat Pekerjaan/Keperluan : Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Pekon
Kode Rekening : 1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01.

Liwa, ...
Yang Berhak Menerima Pembayaran

Meterai
6000

KETERANGAN

Barang-barang termaksud telah masuk buku Persediaan/Inventaris pada tgl. .....

Jumlah Kotor	Pajak Upah	
Jumlah Bersih		
	PPN	
	PPh 21.....	
	PPh 22	
	PPh 23	

Yang Menerima Barang/ Memeriksa pekerjaan tersebut diatas	Pengguna Anggaran,	Bendahara Pengeluaran,	Nama dan Alamat Penerima
	Drs. ADI UTAMA ----------	Y U L I N A ----------	

LAMPIRAN : II.13.

BERITA ACARA

VERIFIKASI/PENELITIAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) .....

KECAMATAN.....TANGGAL ..... TAHUN .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Anggaran Dana Pekon (ADP) telah melakukan verifikasi/penelitian terhadap :

- Usulan Alokasi Dana Pekon (ADP) ..... ***atau untuk tahapan selanjutnya***
- Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta realisasi perkembangan fisik dan keuangan Alokasi Dana Pekon (ADP) .....

Dengan hasil sebagai berikut :

- Lampiran berkas pengajuan dana telah lengkap dan Rencana Penggunaan Dana telah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), ***atau untuk tahapan selanjutnya***
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP)..... ***Tahap I dan Tahap II*** dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan hukum.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN .....

Camat	Kasi Pemerintahan Kecamatan
K e t u a,	Sekretaris,
(.....)	(.....)
Anggota : Sekretaris Kecamatan	(.....)

LAMPIRAN : II.14.

Bukti Setor Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK **(S S P)**	LEMBAR 1

NPWP *(Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)*	0	0	4	1	4	9	9	5	1	3	2	1	0	0	0

NAMA WP : Bendahara Pekon

ALAMAT : Jl. Radin Intan no. 2 Komp.Perkantoran Pemkab. Way Mengaku – Balik Bukit Lampung Barat- 34573

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	**Uraian Pembayaran**
4 1 1 1 2 2	1 0 0	

Jan	Peb	*Mar*	*Apr*	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun
												2 0 1 3

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untk masa yang berkenanan

Diisi tahunterutang pajak

Nomor Ketetapan : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan Rupiah penuh* Rp. ....,-	Terbilang : .....rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... *IV. Cap dan tanda tangan* Nama Jelas :	Wajib Pajak/Penyetor ....., ... 2013 *III.Cap dan tanda tangan* Nama Jelas : .....

Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran

LAMPIRAN : II.8.2.

DAFTAR HONOR LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)
PEKON. . .. . .KECAMATAN. . . . . .
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pekon : . . . . . .
Kecamatan :. . . . . .

Dibayarkan kepada Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) berdasarkan hasil musyawarah Pekon, pada tgl... . . .. dari bulan. . . . .s/d bulan 2013

No	N A M A	JABATAN	HONOR/BLN	JLH. BLN	JUMLAH	JUMLAH
01		Ketua	Rp.			
02		Wkl. Ketua	Rp.			
03		Sekretaris	Rp.			
04		Anggota	Rp.			
05		Anggota	Rp.			
06		Anggota	Rp.			
07		Anggota	Rp.			
08		Anggota	Rp.			
09	Dst.	Anggota	Rp.			
J U M L A H						

Terbilang;

Mengetahui/menyetujui
Peratin ....

. . . . . .

. . . . . ., ... 2013
Yang membayarkan

Bendahara
Pekon . . . . . .

. . . . . .

LAMPIRAN : II.9.

DAFTAR HONOR PELAKSANA TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN PEKON
PEKON. . .. . .KECAMATAN. . . . . .
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pekon : . . . . . .
Kecamatan :. . . . . .

Dibayarkan kepada Honor TPTPKP APBP dari bulan. . . . . .s/d bulan 2013

No	N A M A	JABATAN	Jabatan	HONOR/BLN	JMLH BLN	JUMLAH
01		Penanggungjawab	Peratin			
02		Koordinator/	Juru tulis			
03		Anggota	Kaur			
04		Anggota	Kaur			
05		Anggota	Kaur			
J U M L A H						

Terbilang;

. 2013
Yang membayarkan

Mengetahui/menyetujui
Peratin ....

. . . . . .

Bendahara
Pekon . . . . . .

. . . . . .

LAMPIRAN : II.15.

PEKON .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	KODE				URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
Jumlah								

Jumlah bulan / tanggal Rp. Rp.
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal Rp. Rp.
Jumlah semua s/d bulan / tanggal Rp. Rp.
Sisa Kas Rp. Rp.

Pada hari ini ..... tanggal .....Bulan.....Tahun.....oleh kami didapat dalam Kas Rp. .....,-
(.....Rupiah)
Terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. .....
b. Saldo Bank Rp. .....
c. Surat Berharga Rp. .....

Peratin

.....

....., (tt/bln/th)
Bendahara

.....

LAMPIRAN : II.15.1.

PEKON .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUKU PEMBANTU PENERIMAAN

Kode :
Nama :
Jumlah Anggaran : Rp. .....
Tahun Anggaran :

No urut	No. BKU	Tanggal Setor	Nomor STS & Bukti Lainnya	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5

Jumlah Bulan Ini Rp. .....
Jumlah s/d Bulan lalu Rp. .....
Jumlah s/d bulan ini Rp. .....

Peratin,

.....

..... , (tt/bln/th)
Bendahara

.....

LAMPIRAN : II.15.2.

PEKON .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. .....

Bank : .....
No. Rekening : .....

Harap terima uang sebesar Rp. .....
(.....Rupiah)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO.	KODE	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH
1	2	3	4

Uang tersebut diterima tanggal .....

Peratin

.....

....., (tt/bln/th)
Bendahara

.....

LAMPIRAN : II.15.3.

PEKON .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUKU PEMBANTU PENGELUARAN

Kode :
Nama :
Jumlah Anggaran : Rp. .....
Tahun Anggaran :

NO. URUT	NOMOR BKU	PENGELUARAN
1	2	3
Jumlah Bulan ini		
Jumlah s/d bulan lalu		
Jumlah s/d bulan ini		

Peratin

.....

....., (tt/bln/th)
Bendahara

.....

LAMPIRAN : II.15.4.

BUKTI PENGELUARAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pekon :

Tahun Anggaran :

No. .....

SURAT BUKTI PENGELUARAN

Sudah terima dari .....
Uang Sejumlah .....
(.....)
Yaitu untuk pembayaran .....
.....
.....

....., ...
Yang berhak menerima
Pembayaran

(.....)

KETERANGAN

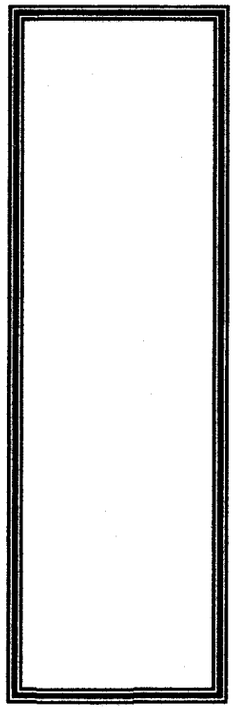
Barang-barang termaksud telah masuk buku persediaan / inventaris pada tanggal

Jumlah Kotor	Pajak Upah	Jumlah Bersih
	PPN	
	PPh 21	
	PPh 22	
	PPh 23	

Pengeluaran / Pembelian dilakukan berdasarkan

Yang menerima barang / Memeriksa Pekerjaan Tersebut	Peratin,	Bendahara,	Nama dan Alamat Penerima
	(.....)	(.....)	

LAMPIRAN : II.15.5.



No. .....

Sudah Terima Dari : .....

Banyaknya Uang : .....

Untuk Pembayaran : .....

.....

.....

....., ...

Mengetahui
Peratin .....,

.....

Bendahara Pekon,

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI